



Bahan bakar nabati:

Dampak di Indonesia, saatnya perubahan kebijakan di Eropa



**Buletin DTE Edisi Khusus
No 96-97, Desember 2013**

DTE

Down to Earth

Kampanye Internasional untuk
Lingkungan Hidup yang Berkeadilan
di Indonesia

Perbaiki kebijakan!

Bahan bakar hayati – yang pernah digadang-gadang sebagai obat mujarab bagi perubahan iklim – ternyata terbukti sebagai salah satu kekeliruan kebijakan terbesar Uni Eropa

Permintaan minyak sawit untuk biodiesel yang luar biasa besar dari Uni Eropa mendorong ekspansi secara besar-besaran perkebunan industri skala besar, mendorong hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati dan meningkatkan emisi karbon, perampasan dan konflik tanah, serta pelecehan hak asasi manusia di Indonesia. Hilangnya hutan dan lahan pertanian mengancam kedaulatan pangan dari jutaan masyarakat lokal dan adat yang bergantung pada hutan dan tanah untuk memasok makanan.

Pada 2013, DTE dan para oronop sejawat meningkatkan kampanye untuk mendorong para pembuat keputusan agar memperbaiki kebijakan dan menghentikan dampak-dampak menghancurkan terhadap Indonesia. Ada beberapa tanda kemajuan, beberapa kemunduran, dan beberapa keputusan kontroversial dari Parlemen Eropa — tetapi perdebatannya belum berakhir. Saat laporan ini ditulis, para pembuat keputusan Uni Eropa (UE) berada di tengah-tengah negosiasi yang genting yang dapat mengubah kebijakan ke salah satu arah sehingga kita masih harus terus melakukan tekanan.

Buletin ini menyoroti perkembangan yang paling penting di tahun ini dalam pembuatan kebijakan bahan bakar hayati di UE dan mencermati apa yang terbentang di hadapan kita, serta menyoroti tanggung jawab industri minyak sawit untuk membereskan bisnis mereka di Indonesia.

Terima kasih atas semua dukungan Anda sejauh ini! Tahun 2014 akan menjadi sangat penting untuk menentukan arah demi masa depan kebijakan bahan bakar hayati. Silakan lanjutkan membaca untuk mengetahui lebih banyak mengenai kampanye bahan bakar hayati dan bagaimana Anda bisa membantu.



Halaman depan: perkebunan sawit di hutan yang dibuka di Papua Barat;
Paling atas: perkebunan sawit Asiatic Persada di Jambi, Sumatera;
Atas: para aktivis dari Indonesia dan Eropa menyerahkan petisi OMS yang ditandatangani 243.998 orang kepada anggota parlemen Eropa kunci termasuk Corinne Lepage, di Parlemen Eropa di Strasbourg, 11 September 2013

Daftar Isi

OMS minta UE untuk menghentikan perampasan tanah Indonesia untuk bahan bakar nabati	1
Petisi Masyarakat Sipil Indonesia	4
Wawancara dengan Bondan Andriyanu, Sawit Watch	7
AMAN menuduh perusahaan kelapa sawit dan pulp	12
Presiden SBY dituntut oleh para penduduk desa di Riau, WALHI	12
Kenapa jangan Wilmar?	13
Perkebunan, stasiun pengisian bahan bakar dan pembangkit listrik	20

OMS minta UE untuk 'menghentikan perampasan tanah Indonesia untuk bahan bakar hayati'

Sebuah pemungutan suara yang menentukan tentang bahan bakar hayati di Parlemen Eropa pada 11 September 2013 telah gagal memperbaiki kebijakan yang cacat yang mendorong deforestasi, perampasan lahan dan pelecehan hak-hak asasi manusia, seraya menggerogoti kedaulatan pangan masyarakat di negara-negara produsen seperti Indonesia.

Emisi karbon yang meroket; hutan-hutan yang terbakar atau dibulldoser dan habitat alam liar yang rusak; mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan hancur, tanah leluhur mereka diambil tanpa izin. Di Indonesia, beban kehancuran dari revolusi bahan bakar hayati Uni Eropa tersebut jelas sekali dan sudah saatnya Eropa bertanggung jawab.

Ini adalah pesan yang disampaikan selama kampanye bersama antara OMS Indonesia dan internasional - termasuk Down to Earth - di Eropa pada September 2013, saat para Anggota Parlemen Eropa berkumpul untuk pemungutan suara mengenai amendemen terhadap Panduan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive, RED) dan Panduan Kualitas Bahan Bakar (Fuel Quality Directive, FQD) dari UE (lihat kotak).

Nur Hidayati dari Walhi dan Bondan Andriyanu dari Sawit Watch - didukung oleh DTE dan kelompok-kelompok Eropa lainnya - menyajikan kepada para pembuat keputusan di Parlemen tersebut gambaran mengenai seperti apa kehidupan masyarakat lokal Indonesia yang terkena dampak dari ekspansi minyak sawit untuk bahan bakar nabati. Mereka juga menyoroti fakta bahwa menggunakan minyak sawit untuk bahan bakar hayati bersifat kontraproduktif dalam kaitan dengan penanganan perubahan iklim. Sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh 59 OMS Indonesia menghimbau seluruh 766 Anggota

Parlemen Eropa untuk tidak mengabaikan dampak-dampak yang menghancurkan dari produksi bahan bakar nabati di negara-negara produsen seperti Indonesia (lihat petisi OMS, hal.4).

Indonesia sedang berencana untuk lebih melipatgandakan luas kebun kelapa sawit hingga mencapai sekitar 11 juta hektare saat ini. Menurut Sawit Watch, pemerintah telah menerbitkan konsesi awal, atau izin lokasi yang mencakup 26,7 juta hektare lahan untuk pengembangan minyak sawit, yang sepertiga di antaranya berada di lahan gambut.¹

RED dan FQD

RED dan FQD adalah panduan kebijakan penting yang ditujukan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam campuran energi UE dan mengurangi emisi gas rumah kaca Eropa. Panduan-panduan itu juga telah berdampak meningkatkan permintaan minyak sawit dari Indonesia, produsen sawit terbesar dunia, serta produsen-produsen minyak sawit lainnya. UE adalah tujuan utama bagi minyak sawit Indonesia, dan pengimpor paling tinggi terhadap biodiesel sawit yang diproduksi di Indonesia.

Persiapan menuju

pemungutan suara September

Kembali ke Oktober 2012, Komisi Eropa (KE) mengusulkan amendemen kebijakan terhadap RED dan FQD yang telah lama ditunggu-tunggu.² Usulan itu berupaya membatasi dampak-dampak dari kebutuhan Eropa akan bahan bakar nabati dengan memasukkan dua amendemen kritis terhadap Panduan-panduan tersebut: 1) penetapan batas atas sebesar 5%³ atas jumlah bahan bakar hayati berbasis tanaman pangan yang diizinkan dalam target energi terbarukan 10% untuk bahan bakar transportasi, pada 2020; dan 2) pelaporan – tetapi bukan penghitungan – emisi-emisi yang disebabkan oleh perubahan penggunaan tanah secara tak langsung (Indirect Land Use Change – ILUC) (lihat info terkini bahan bakar nabati April 2013 dari DTE untuk latar belakang lebih jauh).⁴ Usulan tersebut bersifat positif dalam arti itulah pertama kalinya Komisi Eropa secara formal telah mengakui bahaya dari penggunaan pangan untuk bahan bakar dan dampak dari ILUC. Namun, DTE dan para ornop lainnya berpendapat bahwa amendemen-amendemen tersebut tidak beranjak cukup jauh untuk menangani dampak-dampak nyata dari bahan bakar nabati terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di negara-negara produsen seperti Indonesia, dan juga tidak mengurangi emisi GRK.⁵



Para aktivis di luar gedung Parlemen Eropa, Strasbourg, September 2013

Sebuah proses panjang

Dibutuhkan beberapa tahap negosiasi lanjutan sebelum amendemen-amendemen tersebut dapat disetujui dan berlaku menjadi undang-undang. Pertama, usulan itu harus dinegosiasikan oleh tujuh komite kunci dari Parlemen Eropa yang akan mengedepankan posisi mereka sendiri terhadap amendemen kebijakan tersebut. Usulan itu kemudian akan berlanjut untuk pemungutan suara pleno penuh oleh Parlemen Eropa pada 11 September 2013, yang berarti bahwa seluruh 766 Anggota Parlemen Eropa akan menyampaikan pendapatnya tentang amendemen mana yang akan diterima atau diubah.

Pada Juli 2013, Komite Lingkungan Hidup (Environment Committee, ENVI), yang ditugaskan untuk memimpin proses tersebut, menyampaikan posisi akhir mereka kepada para Anggota Parlemen Eropa. Posisi akhir tersebut mengandung sejumlah perubahan kritis terhadap usulan awal KE, termasuk penghitungan wajib (ketimbang hanya pelaporan) terhadap emisi ILUC baik pada RED maupun FQD, yang berlaku segera. Posisi akhir itu juga mengusulkan peningkatan batas atas pada bahan bakar nabati menjadi 5,5% (0,5% lebih tinggi dari usulan KE) tetapi yang penting, batas atas ini mencakup tidak hanya tanaman pangan tetapi juga seluruh tanaman berbasis lahan dan akan diterapkan pada keduanya, FGD dan RED – suatu amendemen penting yang akan memiliki dampak positif lebih banyak dalam hal membatasi Perubahan Penggunaan Tanah secara Tak Langsung secara keseluruhan. Secara umum, posisi ENVI adalah suatu perbaikan terhadap usulan KE, tetapi berbagai LSM mendesak para Anggota Parlemen Eropa untuk memperkuat amendemen-amendemen tersebut lebih lanjut dengan memperketat batas atas pada seluruh tanaman berbasis lahan menjadi 5% sebagai sebuah cara membatasi penggunaan bahan bakar berbasis lahan hingga hanya di atas tingkat penggunaan saat ini yang 4,7%. Tuntutan LSM untuk sebuah batas atas 5% adalah suatu usulan sementara pembatasan kerusakan, sebagai langkah menuju pengurangan konsumsi hingga nol secepat mungkin.

Terlepas dari kepemimpinan ENVI dalam proses tersebut, komite-komite lainnya memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi bagaimana para Anggota Parlemen Eropa memberikan suara. Komite Industri, Penelitian dan Energi (Industry, Research and Energy Committee, ITRE), yang lebih terbuka dalam menerima tuntutan industri bahan bakar hayati, menekan agar melemahkan usulan KE dan ENVI. ITRE menuntut batas atas sebesar 6,5%, bukti ilmiah yang lebih banyak sebelum mempertimbangkan pelaporan ILUC, dan menolak opsi-opsi untuk penghitungan ILUC secara keseluruhan.

(bersambung ke hal 3)

Menguraikan jargon

Pembahasan tentang istilah berikut ini berupaya untuk menunjukkan beberapa perbedaan dan tumpang-tindih antara berbagai macam istilah yang digunakan dalam perdebatan mengenai bahan bakar nabati.

Bahan bakar hayati (biofuel) vs bahan bakar nabati (agrofuel):

UE mendefinisikan **biofuel** (bahan bakar hayati) sebagai bahan bakar cair yang secara biologis berasal dari non-fosil dan suatu sumber energi terbarukan, untuk dibedakan dengan bahan bakar fosil, dan terdiri dari dua kategori: bensin hayati (biogasoline) dan biodiesel.[6]

Tanaman yang digunakan untuk membuat bahan bakar hayati umumnya bersifat kaya akan gula (seperti tebu), tepung (seperti jagung) atau minyak (kelapa sawit). Bahan bakar hayati dapat dihasilkan dari sejumlah besar tanaman, termasuk kacang kedelai, bit gula, minyak rapa, kanola, jatropha, padi dan gandum, serta jagung/maizena, tebu dan kelapa sawit.

Istilah **agrofuel** (bahan bakar nabati) bukanlah bagian dari glosarium UE, tetapi umum dipakai untuk merujuk ke bahan bakar hayati yang dihasilkan dari tanaman yang ditanam dalam skala besar, dan seringkali bersifat monokultur. DTE lebih memilih menggunakan istilah agrofuel ini karena monokultur berskala besar inilah yang menyebabkan dampak-dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Sisa tanaman hutan dan pertanian, seperti batang dan daun, juga digunakan untuk membuat bahan bakar hayati/bahan bakar nabati.

Biodiesel vs bioetanol

Bioetanol dan biodiesel adalah bahan bakar hayati yang umum dipakai dalam transportasi. Biodiesel dibuat dari produk berminyak seperti minyak sayur atau lemak hewan. Ini adalah bahan bakar hayati yang paling umum di Eropa dan biasanya diproduksi dengan mengekstrak minyak-minyak tersebut dari tanaman seperti minyak sawit dari Indonesia. Bioetanol dibuat dari tanaman tepung atau gula seperti gandum atau tebu, yang ditanam secara besar-besaran di Amerika Selatan dan Afrika.

Bahan bakar hayati berbasis tanaman pangan dihasilkan dari tanaman, yang sebenarnya bisa juga dimanfaatkan sebagai pangan – sehingga menimbulkan persaingan bagi produksi pangan.

Bahan bakar hayati berbasis lahan dihasilkan dari tanaman pangan atau nonpangan, yang membutuhkan lahan untuk tumbuh. Minyak sawit dan jatropha adalah sama-sama berjenis bahan baku bahan bakar hayati berbasis lahan. **Tanaman energi** adalah tanaman yang digunakan untuk memproduksi bahan bakar atau bentuk-bentuk energi yang lain, dan mencakup

tanaman pangan dan nonpangan. Jatropha dan rumput-rumputan khusus adalah contoh dari tanaman energi nonpangan.

Bahan bakar hayati dapat diklasifikasikan sebagai **generasi ke-1, ke-2 atau ke-3**, tergantung pada jenis **bahan baku** dan proses produksinya. Suatu **bahan baku** (feedstock) adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat suatu jenis bahan bakar hayati. Minyak sawit, gandum, sisa pertanian dan alga adalah seluruhnya jenis-jenis bahan baku.

Bahan bakar hayati generasi ke-1 ('konvensional') menggunakan teknologi konvensional untuk mengubah minyak, tepung atau gula yang ditemukan dalam tanaman pangan menjadi bahan bakar. Minyak sawit, gandum dan maizena adalah beberapa dari tanaman bahan bakar hayati generasi ke-1 yang paling luas digunakan. Karena tanaman tersebut biasanya ditanam semata-mata hanya untuk tujuan bahan bakar hayati, mereka dianggap bersaing dengan pangan. Saat ini, hampir semua bahan bakar hayati di UE terbuat dari bahan baku generasi ke-1.

Bahan bakar hayati generasi ke-2 biasanya dibuat dari limbah atau sisa pertanian dan kehutanan seperti selulosa, hemiselulosa, lignin atau pektin (yakni bagian yang terbuang ketika tanaman dipanen untuk produk utamanya, seperti produk pangan atau kayu). Mereka juga dapat mencakup tanaman nonpangan yang ditanam dengan sengaja seperti rumput-rumputan energi atau jatropha.

Bahan bakar hayati generasi ke-3 masih dalam masa-masa awal pengembangan. Alga adalah sumber bahan bakar hayati yang paling maju dan padat energi, dan tidak membutuhkan tanah yang baik untuk ditanami, sehingga menjadikannya opsi yang semakin menjanjikan. Namun, biaya produksi yang tinggi saat ini berarti bahwa biayanya akan terlalu mahal di pompa tersebut, sehingga membatasi kelayakannya sebagai suatu bahan bakar komersial.

Istilah '**bahan bakar hayati maju**' seringkali digunakan untuk bahan bakar hayati yang dibuat dari bahan baku generasi ke-2 atau ke-3 dan mengindikasikan proses-proses teknologi yang lebih maju yang dipakai untuk memproduksi bahan bakar tersebut.

Tetapi istilah tersebut harus diperlakukan dengan hati-hati! Bahan bakar hayati generasi ke-2 tidak selalu lebih berkelanjutan ketimbang generasi ke-1. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, persaingan dengan tanaman pangan dan jumlah energi yang digunakan dalam proses produksi perlu dipertimbangkan saat menilai keberlanjutan yang sejati dari bahan bakar hayati.

Kunjungan keliling tentang bahan bakar nabati

Saat pemungutan suara bulan September di Parlemen Eropa di Strasbourg semakin dekat, kegiatan lobi semakin intensif dari kedua pihak yang berdebat itu. Dirasakan penting agar para oronop dan masyarakat tersebut dimobilisasi untuk melawan tuntutan-tuntutan dari lobi industri bahan bakar hayati generasi pertama dan untuk mendesak seluruh Anggota Parlemen Eropa untuk memberi suara untuk mendukung (atau memperkuat) usulan ENVI tersebut. Sebuah tim kampanye yang terdiri dari DTE, Watch Indonesia, FoE Eropa, Misereor, Sawit Watch dan WALHI, mengadakan kunjungan berkeliling selama dua minggu di Parlemen Eropa di Brussels dan Strasbourg untuk memastikan bahwa para Anggota Parlemen Eropa mendengar secara langsung tentang dampak-dampak dari kebijakan UE di lapangan di negara-negara produsen secara langsung dari para perwakilan OMS Indonesia. Melalui pertemuan-pertemuan publik, presentasi, wawancara media, dan diskusi dengan para Anggota Parlemen Eropa, kelompok-kelompok tersebut menyoroti empat masalah utama terkait bahan bakar nabati:

Bahan bakar nabati buruk bagi iklim

Jika dampak-dampak dari perubahan penggunaan tanah secara tak langsung (ILUC) diperhitungkan, sebagian besar bahan bakar nabati berarti emisi karbon lebih banyak, bukan lebih sedikit. Jika lahan gambut dipertimbangkan, minyak sawit dari Indonesia menjadi salah satu bahan bakar terkotor dari yang ada, karbonnya jauh lebih intensif daripada solar dari fosil. Kebijakan bahan bakar nabati yang saat ini berlaku mengabaikan hal ini.

Bahan bakar nabati mempromosikan perampasan lahan, pelecehan hak asasi manusia, konflik

Jutaan hektare lahan dirampas dari masyarakat di negara-negara seperti Indonesia untuk memenuhi permintaan bahan bakar nabati yang terus meningkat dari Eropa. Hak masyarakat adat atas Perizinan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan tidak dihormati. Pasukan keamanan dibawa masuk untuk menangani perlawanan masyarakat terhadap perampasan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang mengarah pada konflik-konflik kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Bahan bakar nabati buruk untuk keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup

Hutan dan keanekaragaman Indonesia yang berharga berada dalam ancaman yang serius dari ekspansi besar-besaran minyak sawit – yang sebagian didorong oleh permintaan bahan bakar nabati dari Eropa. Orangutan yang terancam punah kehilangan habitatnya saat hutan dikonversi



Para aktivis dari WALHI dan Sawit Watch di depan gedung Parlemen Uni Eropa, September 2013

menjadi minyak sawit. Pembakaran ilegal menciptakan asbut (asap kabut) yang mencekik Indonesia dan negara-negara tetangganya. Pertanian intensif dan penggunaan bahan kimia di perkebunan menyebabkan polusi sungai, kelangkaan air, degradasi lapisan tanah dan masalah-masalah kesehatan bagi para pekerja kebun.

Bahan bakar nabati tidak masuk akal secara bisnis atau pembangunan

Subsidi industri bahan bakar nabati yang sangat besar yang dibayar oleh para pembayar pajak di Eropa hanya menciptakan 3600 lapangan kerja langsung di seluruh Eropa pada tahun 2011, seraya menyebabkan kerusakan hutan dan emisi GRK yang lebih tinggi. Ini bertentangan dengan upaya ekonomi dan politik UE yang bertujuan mengurangi deforestasi di Indonesia. Kepedulian masyarakat yang meningkat terhadap dampak-dampak negatif membuat bahan bakar nabati menjadi sebuah investasi bisnis yang berisiko dan menggerogoti kewajiban UE untuk melakukan “pembangunan yang bertanggung jawab”.

Kelompok oronop tersebut menyerukan para Anggota Parlemen Eropa untuk memberi suara mendukung:

1. Penghitungan penuh terhadap seluruh emisi CO₂ yang dihasilkan dari tanaman bahan bakar nabati yang meningkat (yang disebut ‘perubahan penggunaan tanah secara tak langsung’ / ILUC), melalui faktor-faktor ILUC dengan tanaman

tertentu – untuk FQD serta RED. Inilah opsi kebijakan terbaik yang saat ini tersedia untuk tidak memberi motivasi bagi bahan bakar nabati yang bersifat kontraproduktif dalam mengurangi emisi karbon (khususnya minyak sawit).

2. Penghentian pertumbuhan bahan bakar nabati yang bersaing dengan tanaman pangan yang vital, dengan suatu batas atas yang sejati dan sehat (yakni 5% atau kurang yang berlaku bagi FQD dan RED) terhadap penggunaan bahan bakar nabati. Pilih batas atas yang serendah mungkin.

Dan, sebagai langkah-langkah selanjutnya:

- ♦ Suatu penilaian dampak sosial dan lingkungan hidup yang independen mengenai kebijakan bahan bakar nabati UE di negara-negara seperti Indonesia – dengan maksud untuk membuat kriteria

(bersambung ke hal 5)

Protes di Berlin

Hampir seratus orang menghadiri sebuah pertemuan untuk mendiskusikan bahan bakar nabati dan berbagai dampaknya pada pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok oronop di Berlin. Presentasi di antaranya diberikan oleh Bondan Andriyano dari Sawit Watch. Acara itu dijadwalkan bertepatan dengan peluncuran RSPO Eropa yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan minyak sawit berkelanjutan di salah satu pasar utamanya. Watch Indonesia! dan lembaga-lembaga lainnya mengadakan aksi-aksi jalanan untuk menyoroti dampak-dampak negatif dari minyak sawit.

Petisi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Parlemen Uni Eropa Tentang Kebijakan Biofuel Eropa

Jakarta, Indonesia September, 2013

Pada tanggal 11 September 2013, Parlemen Uni Eropa akan bersidang untuk memutuskan perubahan penting terhadap kebijakan bahan bakar nabati (biofuels) Uni Eropa. Jika tidak dilakukan tindakan untuk membatasi permintaan atas biofuels, maka kebijakan ini akan mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup di negara-negara produsen seperti Indonesia yang menanam komoditas biofuel untuk pasar Eropa.

Minyak kelapa sawit yang diproduksi di Indonesia dan Malaysia terus mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel demi pencapaian target Uni Eropa. Pada saat yang sama, biofuel juga menjadi bagian yang penting dalam rencana pemerintah mengembangkan industri kelapa sawit, dengan perkiraan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit dari 11 juta hektar menjadi 28 juta hektar di tahun 2020.

Kami, masyarakat sipil Indonesia, menyerukan kepada Parlemen Eropa untuk tidak menutup mata terhadap berbagai dampak buruk dari produksi komoditas biofuel di negara-negara produsen seperti Indonesia. Target yang ditetapkan melalui kebijakan biofuel ini akan mendorong terus terjadinya ekspansi industri perkebunan monokultur skala besar, seperti kelapa sawit, yang berarti terus berlanjutnya berbagai masalah lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Industri perkebunan kelapa sawit skala besar telah menimbulkan berbagai masalah serius bagi komunitas-komunitas dan lingkungan hidup di Indonesia, juga di negara-negara produsen lainnya. Beberapa masalah utama adalah:

Perkebunan kelapa sawit skala besar merupakan salah satu kontributor

terbesar pelepasan gas rumah kaca Indonesia akibat penggundulan hutan, pembakaran lahan dan pengeringan lahan gambut. Oleh karenanya, biofuel yang berasal dari minyak sawit tidak akan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, sebaliknya, malah akan meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar juga telah mengakibatkan perampasan lahan masyarakat adat dan masyarakat lokal, konflik, serta pelanggaran HAM oleh aparat negara. Tidak diakui hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah telah menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat dan perusahaan, yang seringkali berakhir pada tindak kekerasan aparat pemerintah yang mendukung perusahaan.

Sistem perkebunan kelapa sawit skala besar tidak menghormati hak-hak pekerja, menimbulkan ketidakadilan gender, serta sering melibatkan anak-anak dalam proses produksinya yang mengakibatkan anak-anak kehilangan haknya untuk sekolah. 80 persen pekerja di perkebunan kelapa sawit skala besar –laki-laki dan perempuan, adalah buruh harian lepas (BHL) yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan kerja, dan dibayar dengan upah yang sangat murah yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar menyebabkan hilangnya kedaulatan pangan masyarakat-masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber pangan dan penghidupannya. Banyak perusahaan kelapa sawit skala besar menghancurkan lahan, hutan serta wilayah pesisir yang subur dan menggantinya dengan tanaman monokultur kelapa sawit.

Kami, masyarakat sipil Indonesia, sangat khawatir dengan adanya kebijakan

biofuel dalam Uni Eropa yang akan mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar terhadap jutaan masyarakat Indonesia dan gagal menurunkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.

Oleh karenanya, kami, masyarakat sipil Indonesia, menyerukan kepada Uni Eropa untuk:

1. Tidak menggunakan biofuel yang berasal dari perkebunan monokultur skala besar
2. Tidak menggunakan biofuel yang berasal dari pembukaan hutan alam dan lahan gambut
3. Tidak menggunakan biofuel yang berasal dari lahan-lahan yang berkonflik dengan masyarakat lokal
4. Tidak menggunakan biofuel yang berasal dari perusahaan yang terlibat praktik pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran hak pekerja, hak perempuan, dan di dalam proses produksinya terdapat keterlibatan anak-anak.
5. Mengurangi konsumsi minyak sawit Eropa dan segera menghentikan penggunaan minyak sawit untuk biofuel.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) – Friends of the Earth Indonesia

2. SawitWatch (Oil Palm Watch)

Dan 57 CSO lainnya (Lihat Lampiran)

Sumber:

<http://sawitwatch.or.id/2013/09/petisi-masyarakat-sipil-indonesia-kepada-parlemen-uni-eropa-tentang-kebijakan-biofuel-eropa/#sthash.vpHAh8MB.dpuf>



buah kelapa sawit

keberlanjutan yang bersifat wajib, untuk tidak memasukkan bahan bakar nabati atau bahan baku bahan bakar nabati yang diimpor ke dalam UE yang tidak memenuhi standar lingkungan hidup dan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip perdagangan yang adil.

- ♦ Langkah-langkah kebijakan menuju penghapusan bertahap terhadap seluruh bahan bakar nabati berbasis lahan, dan penghapusan bertahap terhadap berbagai subsidi, untuk menurunkan konsumsi mereka hingga nol secepat mungkin.
- ♦ Penerapan berbagai insentif kebijakan yang menjadikan transportasi kita ramah lingkungan yang sejati. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan yang memusatkan perhatian pada pengurangan gas rumah kaca, penghematan energi besar-besaran, dan pengalihan moda transportasi akan menjadi cara yang lebih efektif terhadap mitigasi perubahan iklim, tanpa biaya-biaya sosial dan lingkungan hidup dari bahan bakar nabati.⁷

Sebagai seorang panelis bersama dengan Pelapor ENVI Corinne Lepage pada Debat Akbar Bahan Bakar Hayati Parlemen, Nur Hidayati dari Walhi menyampaikan keprihatinan dari OMS Indonesia kepada peserta dari 180 perwakilan industri, politik, media dan ornop. Protes jalanan yang berwarna-warni di Parlemen Eropa di Brussels dan Strasbourg memperlihatkan para aktivis berpakaian tongkol jagung dengan menuntut 'Pangan Tidak untuk Bahan Bakar' dan meminta UE untuk "hentikan perampasan lahan Indonesia untuk bahan bakar hayati". Pada hari pemungutan suara, para ornop menyerahkan petisi dengan 243.998 tanda tangan kepada para Anggota Parlemen Eropa yang utama, termasuk Pelapor ENVI.

Amendemen yang mengusulkan PADIATAPA

Satu hasil yang berpotensi positif adalah dicantumkannya prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam amendemen-amendemen yang diusulkan oleh para Anggota Parlemen Eropa dalam pemungutan suara kebijakan bahan bakar nabati pada September 2013.

Susunan katanya adalah sebagai berikut, baik pada FQD maupun RED:

'4a. Bahan bakar hayati dan cairan hayati yang dipertimbangkan untuk tujuan yang dimaksud dalam paragraf 1 tidak dibuat dari bahan baku berbasis lahan kecuali apabila hak-hak hukum pihak ketiga menyangkut penggunaan dan penguasaan lahan tersebut dihormati, di antaranya dengan memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan dari pihak ketiga tersebut,¹¹ dengan keterlibatan dari lembaga-lembaga perwakilan mereka.'¹²

Kedaulatan pangan

Kedaulatan pangan mengacu pada hak-hak masyarakat untuk mendefinisikan sistem pangan mereka sendiri dan menjadi pusat dari keputusan tentang sistem dan kebijakan pangan.

Perubahan penggunaan tanah secara tak langsung yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan minyak sawit untuk bahan bakar hayati menghancurkan hutan yang digunakan oleh jutaan masyarakat lokal dan adat untuk berburu, mengumpulkan dan bercocok tanam.

Dengan mengalokasikan ulang lahan untuk memelihara tanaman bahan bakar hayati ketimbang memberi makan untuk masyarakat, kebijakan-kebijakan bahan bakar hayati dari UE tersebut merampas hak-hak masyarakat Indonesia terhadap kedaulatan pangan.

DTE, dengan didukung oleh Biofuelwatch juga menyerukan para warga UE untuk menulis surat kepada para Anggota Parlemen Eropa mereka dan mendesak mereka untuk memilih memastikan amendemen-amendemen ini.⁸

Hasil utama pemungutan suara

Para Anggota Parlemen Eropa memilih untuk menetapkan batas atas 6% terhadap penggunaan 'bahan bakar hayati berbasis lahan' (juga dikenal sebagai generasi pertama) untuk memenuhi permintaan bahan bakar Eropa. Karena bahan bakar hayati generasi pertama telah memenuhi porsi 4,7% dari pasar bahan bakar transportasi UE, para ornop menekan para Anggota Parlemen Eropa untuk membuat batas atas menjadi 5% untuk membatasi penggunaan saat ini, dan kerusakan yang disebabkan, hingga hanya di atas level saat ini. Meski hanya lebih tinggi 1%, batas atas 6% tersebut yang dipilih oleh para Anggota Parlemen Eropa akan memiliki dampak besar bagi keamanan pangan dan kedaulatan pangan di beberapa negara termiskin dunia dan, menurut ornop internasional Actionaid, "akan membuat tanaman yang alih-alih berpotensi memberi makan bagi lebih dari 20 juta orang justru dibakar setiap tahun sebagai bahan bakar di dalam mobil."⁹

Para Anggota Parlemen Eropa memang memilih mendukung penghitungan emisi ILUC dalam Panduan Kualitas Bahan Bakar, tetapi ini tidak akan diberlakukan hingga 2020 dan tidak akan diberlakukan terhadap RED. Keputusan ini betul-betul tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat Eropa masih akan membayar subsidi yang tinggi dalam tujuh ke depan untuk mendukung biodiesel yang memiliki jejak karbon yang lebih besar ketimbang bahan bakar fosil.

Para Anggota Parlemen Eropa menyokong target 2,5% untuk bahan bakar hayati generasi kedua, yang dibuat dari sumber-sumber nonpangan seperti limbah

pertanian, kotoran dan alga. Mereka juga memilih mendukung 'penghitungan berganda' terhadap bahan bakar hayati maju – yang berarti bahwa bahan bakar maju tertentu dapat dihitung 2 atau 4 kali terhadap target-target energi terbarukan. Perubahan-perubahan ini mengirimirkan sebuah sinyal positif kepada industri untuk berpindah dari bahan bakar hayati generasi ke-1 dan menuju generasi ke-2.

Keputusan penting lainnya adalah sebuah target 7,5% terhadap porsi bioetanol di dalam bahan bakar hayati – yang memberi sinyal sebuah peralihan dari biodiesel ke bioetanol. Sementara peralihan dari biodiesel tersebut akan menjadi sebuah langkah positif bagi negara-negara seperti Indonesia, yang menyediakan minyak sawit untuk biodiesel, hal itu menjadi berita buruk bagi negara-negara yang menderita akibat dampak lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia dari perkebunan untuk tanaman bioetanol.

Berbalik arah

Pemungutan suara itu sangat tipis hasilnya dan banyak Anggota Parlemen Eropa mengakui dan bertindak berdasarkan keprihatinan Sawit Watch dan WALHI, tetapi sebuah kelompok inti Anggota Parlemen Eropa yang kuat mempengaruhi hasil tersebut hingga mendukung reformasi yang lebih lemah. Hasil ini tidak akan membawa keringanan bagi masyarakat yang menderita akibat dampak-dampak dari kebijakan bahan bakar nabati UE di lapangan – sebuah tindakan berbalik arah yang mengecewakan terhadap janji-janji UE untuk memperbaiki kebijakannya yang gagal.

"Para Anggota Parlemen Eropa telah mengabaikan keprihatinan jutaan orang Indonesia mengenai dampak-dampak dari kebijakan bahan bakar nabati UE terhadap tanah dan penghidupan mereka. Pemungutan suara ini akan memperburuk deforestasi, perampasan lahan dan pelecehan hak-hak asasi manusia di Indonesia," kata Nur Hidayati dari WALHI.¹⁰ UE telah kehilangan kesempatan penting untuk memperbaiki aspek-aspek yang paling merusak dari kebijakan bahan bakar hayatinya dan sekali lagi, telah memprioritaskan industri dan perdagangan di atas masyarakat dan lingkungan hidup.

Reaksi Indonesia

Kampanye tersebut menghasilkan reaksi-reaksi yang keras di Indonesia, dengan tuduhan-tuduhan negatif terhadap para ornop lokal maupun luar negeri karena menyuarakan keprihatinan mereka tentang industri-industri pulp dan kertas dan minyak sawit. Beberapa hari setelah pemungutan suara pada 11 September tersebut, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyerukan pemerintah untuk memainkan peran penting dalam mengusir LSM, khususnya dari luar negeri, yang menyerang industri-industri pulp dan kertas dan minyak sawit. Dia mendesak industri-industri ini untuk melawan citra negatif tersebut dengan bersikap lebih

proaktif dalam mempromosikan pengoperasian mereka yang lebih ramah lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup setuju bahwa para ornop – khususnya yang dari luar negeri – dengan sengaja membesar-besarkan masalah lingkungan hidup dengan tujuan mencegah pembangunan industri-industri pulp dan kertas dan minyak sawit Indonesia, dan seharusnya tidak diizinkan untuk terus melakukan hal ini.¹³

Reaksi ini, dan perdebatan di Indonesia tentang bahan bakar hayati dan dampak-dampaknya terhadap kebijakan UE, adalah sebuah sinyal bahwa pesan-pesan Sawit Watch dan WALHI tersebut disuarakan secara efektif di Eropa. Selain itu, diskusi-diskusi tentang bagaimana memperbaiki sistem penyelesaian sengketa dari Forum Meja Bundar tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil) telah mendapat dorongan ekstra oleh kampanye Eropa tersebut. Sebuah resolusi yang dirancang oleh Sawit Watch, yang juga anggota RSPO, baru-baru ini disetujui pada pertemuan terakhir organisasi itu di Medan.

Apa yang terjadi selanjutnya?

Hasil-hasil dari pemungutan suara Parlemen Eropa ('pembahasan pertama') harus disampaikan ke Dewan Menteri (yakni Negara Anggota) untuk peninjauan lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi peraturan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pelapor Corinne Lepage meminta mandat dari Parlemen untuk segera maju bernegosiasi dengan Dewan tersebut – tetapi usulannya ditolak oleh satu suara. Sebagai gantinya, sebuah kelompok Anggota Parlemen Eropa membuat usulan tandingan untuk mengembalikan amendemen-amendemen tersebut ke Parlemen Eropa untuk 'pembahasan kedua', menyusul peninjauan Dewan tersebut – dan dimenangkan oleh dua suara. Ini adalah momen kritis dalam proses tersebut, yang dapat menyebabkan penundaan tanpa batas dalam memperbaiki kebijakan tersebut.

Penundaan lebih lama

Bola sekarang (Desember 2013) ada di tangan Dewan UE karena mereka menyelesaikan pembahasan pertama dari amendemen-amendemen kebijakan tersebut. Dewan tersebut memiliki kesempatan untuk memperkuat amendemen-amendemen tersebut, tetapi posisi Parlemen Eropa telah membelah negara-negara Anggota. Para pemain kunci seperti Inggris, Belanda, Belgia dan Finlandia dilaporkan ingin sekali melihat batas atas tersebut dikurangi, tetapi hanya untuk tanaman pangan. Yang lainnya, seperti Jerman, menolak bersuara lantang secara terbuka tentang posisi mereka atau menekan agar batas atas tersebut ditingkatkan menjadi 7% atau bahkan 8%. Beberapa negara anggota mendorong untuk tidak memasukkan faktor-faktor ILUC dari kebijakan tersebut secara bersama-sama.

Debat yang masih berlangsung itu berarti bahwa Dewan tidak akan menyelesaikan posisi mereka dan menyetujui untuk mengembalikan ini ke Parlemen Eropa untuk peninjauan akhir (pembahasan kedua) hingga pertengahan Desember 2013. Dengan pemilihan Parlemen yang ditetapkan pada April tahun depan dan para Komisioner baru akan menempati kursi-kursi mereka, tampaknya tidak mungkin dihasilkan sebuah persetujuan sebelum 2015.

Jadi apa arti semua ini? Secara singkat, UE telah berhasil mengerem kemajuan positif terhadap perbaikan kebijakan bahan bakar hayati selama sedikitnya satu tahun lagi, dengan mengabaikan bukti ilmiah akan dampak-dampak yang menghancurkan dari kebijakan tersebut. Penundaan lebih lama memungkinkan lebih banyak waktu bagi lobi industri untuk membangun tekanan terhadap para pembuat kebijakan untuk melemahkan atau meniadakan amendemen-amendemen tersebut. Penundaan tersebut juga menciptakan ketidakpastian lebih lanjut bagi investasi dalam alternatif-alternatif energi terbarukan yang lebih inovatif, termasuk bahan bakar maju yang berkelanjutan. Masih lebih buruk, hal itu meningkatkan risiko harga pangan yang lebih tinggi, emisi karbon yang lebih banyak dan konflik-konflik lahan di negara-negara produsen seperti Indonesia.

Informasi lebih lanjut: Clare McVeigh
dteproguk@gn.apc.org.



Pekerja perkebunan sawit, Riau. (Foto: DTE)

Catatan:

- 1 FPP, CIRAD, ILC Palm oil dan masyarakat adat di Asia Tenggara, Januari 2011, hal. 21; Norman Jiwan 'Deforestation Moratorium is not Panacea?', Jakarta Post, 1 Juli 2010 di <http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/01/deforestation-moratorium-not-panacea.html>
2. Lihat www.downtoearth-indonesia.org/id/story/analisis-dte-tentang-perkembangan-penting-dalam-kebijakan-agrofuel-eropa-latar-belakang
3. Untuk informasi lebih lanjut lihat http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2012/10/2012

- 1017_biofuel_en.htm
4. www.downtoearth-indonesia.org/id/story/analisis-dte-tentang-perkembangan-penting-dalam-kebijakan-agrofuel-eropa-latar-belakang
5. Lihat analisis DTE April 2013 di <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/analisis-dte-terhadap-proposal-oktober-2012-dari-komisi-eropa>.
6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Category:Energy_glossary
7. Lihat 'Menangani dampak dari kebijakan bahan bakar nabati UE terhadap Indonesia', Laporan bersama oleh DTE, 11.11.11. Sawit Watch, WALHI, Friends of the Earth Europe, Watch Indonesia! dan Misereor, 2 September 2013
8. Lihat <http://www.downtoearth-indonesia.org/simplenews/urgent-agrofuels-action-write-your-meps>
9. 'Food should be used to fill people, not cars' Lucy Hurn, Actionaid, 24 September 2013.
10. Lihat 'Pemungutan suara tentang agrofuel di Eropa mengorbankan ketahanan pangan, hak-hak dan iklim' Pernyataan bersama oleh DTE, 11.11.11, Watch Indonesia! dan WALHI, 13 September 2013.
- 11 Catatan: FPIC (PADIATAPA) adalah bagian dari hukum internasional yang telah berkembang terkait dengan masyarakat adat, dan dengan demikian 'pihak ketiga' sebagaimana ditetapkan dalam amendemen yang diusulkan, meski mencakup masyarakat adat, adalah kategori yang agak terlalu luas. Untuk diskusi lebih lanjut mengenai ini, lihat The Rights of Non-Indigenous 'Forest Peoples' with a focus on Land and Related Rights - Existing International Legal Mechanisms and Strategic Options [Hak-hak dari 'Masyarakat Hutan' Bukan-adat dengan fokus pada Tanah dan Hak-hak Terkait, Mekanisme Hukum Internasional yang Berlaku dan Opsi-opsi Strategis], Kertas Diskusi FPP, 18 September 2013.
12. P7_TA-PROV(2013)0357, Fuel quality directive and renewable energy ***I, European Parliament legislative resolution of 11 September 2013 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)) [Panduan kualitas bahan bakar dan energi terbarukan ***I, Resolusi legislasi Parlemen Eropa pada 11 September 2013 terhadap usulan untuk suatu panduan dari Parlemen Eropa dan dari Dewan yang mengamendemen Panduan 98/70/EC yang berkaitan dengan kualitas bahan bakar bensin dan solar dan yang mengamendemen Panduan 2009/28/EC terhadap promosi penggunaan energi dari sumber-sumber terbarukan], dapat diperoleh di [http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/09-11/0357/P7_TA-PROV\(2013\)0357_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/09-11/0357/P7_TA-PROV(2013)0357_EN.pdf)
13. Antara, 18 September 2013. <http://id.berita.yahoo.com/kadin-peran-pemerintah-halau-ngo-170123499--finance.html> ♦

Impor bahan bakar nabati Eropa: memeriksa realitas di lapangan di Indonesia

Bondan Andriyanu dari Sawit Watch berkunjung ke Berlin, Brussels dan Strasbourg pada September 2013. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada para pembuat kebijakan Eropa mengenai kebutuhan yang mendesak untuk mereformasi kebijakan Uni Eropa (UE) tentang bahan bakar nabati karena dampak-dampaknya yang merugikan di Indonesia. Sebelum kunjungan Bondan ke Eropa tersebut, DTE mewawancarainya tentang organisasinya dan tujuannya ke Eropa.

DTE: Bisakah Anda memberikan kami sedikit tambahan informasi tentang organisasi Anda? Apa fokus kerja-kerja Anda saat ini?

Bondan Andriyanu: Sawit Watch adalah organisasi non pemerintah (ornop) dengan keanggotaan secara individu dan kelompok yang bekerja untuk praktik yang lebih baik dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kami memiliki 140 anggota di seluruh Indonesia dari berbagai latar belakang: petani kecil, buruh, masyarakat adat, aktivis ornop, anggota pemerintah, dan lain-lain. Sawit Watch sedang bekerja untuk perubahan sosial bagi para petani kecil, buruh, dan masyarakat adat untuk mencapai keadilan ekologis. Kerja-kerja untuk keadilan ekologis bagi kelompok-kelompok ini di antaranya mencakup inisiatif-inisiatif untuk:

- ♦ Menyiapkan, mengelola dan menyediakan data dan informasi;
- ♦ Meningkatkan kapasitas para petani kecil, buruh dan masyarakat adat, sesuai dengan kebutuhan mereka;
- ♦ Memfasilitasi penyelesaian konflik antara perusahaan dan para petani kecil, buruh dan masyarakat adat dalam perkebunan kelapa sawit skala besar;
- ♦ Membentuk sinergi antara para petani kecil, buruh dan masyarakat adat;
- ♦ Mendorong pengadopsian kebijakan negara yang melindungi kepentingan para petani kecil, buruh dan masyarakat adat.

DTE: Apa yang Anda harapkan dapat dicapai saat berada di Eropa?

BA: Sawit Watch berharap agar kami dapat memperoleh kesempatan untuk memberikan informasi kepada publik secara tatap muka tentang fakta-fakta dan realitas akan apa yang sedang terjadi dalam industri perkebunan kelapa sawit.

Pertemuan-pertemuan yang berbeda akan memberikan kesempatan yang berbeda bagi kami:

- Pada Pertemuan GIZ RSPO (Pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil atau OMS) di Berlin, tujuan kami adalah untuk menyampaikan tentang banyaknya kelemahan dari Forum Meja Bundar tentang Kelapa Sawit



Bondan Andriyanu dari Sawit Watch di Strasbourg, September 2013. Wawancara singkat DTE dengan Bondan dan Nur Hidayati dari WALHI, tersedia di: <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/agrofuels-message-europes-meps-walhi-and-sawit-watch>

Berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) yang terbukti ada selain dari dampak positif yang dimiliki RSPO tersebut sejak Sawit Watch menjadi anggota RSPO pada 2004. Sawit Watch akan berbagi informasi yang didapat dari kunjungan lapangan kami ke perkebunan kelapa sawit. Kami berharap agar informasi ini akan dipertimbangkan oleh kelompok OMS Eropa yang menghadiri pertemuan itu, dalam kampanye mereka tentang perkebunan kelapa sawit dan perdagangan minyak sawit internasional.

- Di Pertemuan Puncak RSPO Eropa, juga di Berlin, Sawit Watch tidak berharap banyak dari RSPO itu sendiri. Jelas sekali bahwa acara ini akan memusatkan perhatian pada peningkatan Minyak Sawit Bersertifikat Berkelanjutan (Certified Sustainable Palm Oil, CSPO) di pasar Eropa, sementara, dalam pandangan kami pusat perhatian tersebut seharusnya ada pada praktik-praktik di lapangan dari para anggota RSPO itu sendiri. Masih banyak kasus-kasus konflik yang melibatkan masyarakat dan para anggota RSPO, yang pada saat yang sama, sedang

mencoba memperoleh sertifikasi. Salah satu dari masalah-masalah utama tersebut adalah melacak minyak sawit mentah (crude palm oil, CPO) dalam perjalanannya dari para petani atau penanam, melalui pemrosesan, hingga saat diperdagangkan di pasar internasional. Kami dapat berbicara tentang ini.

- Di Lokakarya Jurnalis tentang Kebijakan Bahan Bakar Hayati UE, tujuan utama kami adalah memberikan para jurnalis informasi tentang praktik-praktik dari perusahaan kelapa sawit yang memproduksi CPO untuk bahan bakar nabati. Ada banyak masalah yang akan diangkat: dampak lingkungan hidup dan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh praktik-praktik industri kelapa sawit.

- Dalam kesempatan untuk aksi publik apapun, Sawit Watch bermaksud ingin menyoroti bahaya lingkungan hidup, kehancuran sosial, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terkait dengan pembuatan bahan bakar nabati dari minyak sawit dan untuk menyampaikan pesan ini ke publik di Eropa. Dengan demikian mereka dapat memikirkan kembali penggunaan bahan bakar nabati yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit.

- Di Parlemen Eropa, kami ingin mengangkat fakta bahwa kebijakan-kebijakan bahan bakar nabati masih memiliki banyak dampak negatif. Mungkin saja ada peraturan-peraturan yang baik dan kebijakan-kebijakan yang bagus, tetapi kenyataannya di lapangan adalah bahwa praktik-praktiknya buruk. Dengan demikian kami ingin menyoroti perlunya sistem yang memonitor dan melacak kondisi-kondisi di tingkat perkebunan, tempat ditanamnya tanaman bahan bakar nabati – memeriksa dampak-dampaknya terhadap para petani, tanah-tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal.

DTE: Apa informasi penting yang harus diketahui masyarakat di Eropa tentang impor minyak sawit dari Indonesia?

BA: Sawit Watch meyakini bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia bergantung pada permintaan pasar. Tidak ada kriteria impor di Eropa yang mensyaratkan penilaian dampak sosial bagi

perkebunan yang minyak sawitnya memasuki Eropa. Dengan pasar yang begitu terbuka lebar, pasar itu mendorong negara-negara produsen di Selatan, seperti Indonesia, untuk membuat peraturan yang makin memudahkan bisnis untuk memperluas operasi perkebunan kelapa sawit mereka. Tidak ada nilai tambah bagi produsen skala kecil dalam jenis pasar terbuka ini karena tidak ada persyaratan awal untuk melindungi kepentingan mereka.

Ada tiga aktor utama dalam produksi minyak sawit Indonesia: para petani kecil, sektor swasta dan negara. Perkebunan yang dioperasikan oleh sektor swasta dan BUMN cenderung bersifat merusak secara sosial dan lingkungan hidup, sedangkan perkebunan milik para petani skala kecil tercatat tingkat konflik atau deforestasinya nihil. Dampak-dampak tersebut muncul karena didorong oleh target pemerintah Indonesia untuk memperluas wilayah lahan perkebunan kelapa sawit hingga lebih dari 24 juta hektare dengan target produksi lebih dari 40 juta ton setahun pada 2020.

Sawit Watch akan memberikan informasi, yang diperoleh dari investigasi lapangan kami, tentang apa yang terjadi pada berbagai tahap dalam proses pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hal ini mencakup proses memperoleh izin perkebunan; pembabatan lahan; proses 'kemitraan' di antara perusahaan; proses sertifikasi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung investasi skala besar di Indonesia.

DTE: *Apa dampak-dampak dari perluasan minyak sawit di Indonesia?*

BA: Hak-hak asasi manusia: Masyarakat lokal dan masyarakat adat kehilangan hak-hak mereka. Masyarakat adat sedang kehilangan wilayah mereka. Jumlah kasus di mana masyarakat adat dan penanam kelapa sawit dikriminalkan makin bertambah setiap tahun. Menurut data Sawit Watch, ada 643 komunitas yang berkonflik dengan perusahaan pada 2012. Dan kriminalisasi para petani juga terus meningkat. Pada 2010 ada 141 korban kriminalisasi dari pihak petani, dan pada 2012 ada 156 korban.

Sawit Watch menemukan bahwa para investor membayar militer dan polisi untuk menangani protes-protes masyarakat yang ingin memastikan pembayaran dari perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk tanah mereka. Dalam banyak kasus, masyarakat kalah dalam gugatan mereka di pengadilan karena para hakim telah dibayar oleh perusahaan tersebut.

Lingkungan hidup: Berbagai kasus mencakup kebakaran hutan yang disebabkan ketika perusahaan besar menggunakan pembakaran untuk membatasi lahan – ada banyak kebakaran pada Mei dan Juni 2013. Kami mengidentifikasi 925 'titik panas' (yang mengindikasikan kebakaran) di lahan yang disewakan pada perusahaan perkebunan

ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA (SERBUNDO)



Pernyataan Sikap Aliansi Serikat Buruh Indonesia

Hentikan Eksploitasi Terhadap Buruh Perkebunan dan Industri

Hentikan Ekspansi Perkebunan Besar Kelapa sawit

Di November 2013, Serbundo menuntut kepada RSPO lewat Sidang Tahunan ke-11 di Medan agar:

- ♦ Membentuk Kelompok kerja perburuhan di RSPO dan menjamin keterwakilan Buruh dalam Kelompok kerja tersebut;
- ♦ Menjamin keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam mekanisme pengaduan RSPO
- ♦ Melibatkan Buruh dan Masyarakat sekitar dalam proses sertifikasi;
- ♦ Mencabut sertifikat RSPO bagi perkebunan yang melanggar hak-hak buruh, petani dan masyarakat sekitar.
- ♦ Menuntut RSPO agar mewajibkan perusahaan perkebunan anggota RSPO memberikan upah yang layak bagi buruh.
- ♦ Menuntut RSPO agar mewajibkan perusahaan perkebunan anggota RSPO agar tidak memberlakukan outsourcing, buruh harian lepas, buruh borongan, buruh kontrak, dalam pekerjaan pemanen, penyemprot, pemupuk, perawatan dan pekerjaan-pekerjaan, berhubungan dengan zat kimia dan rentan dengan kesehatan dan keselamatan kerja .
- ♦ Menuntut RSPO untuk mewajibkan perusahaan perkebunan anggota RSPO agar tidak menghalang-halangi kebebasan berserikat di perkebunan.

Pernyataan lengkap tersedia di: <http://sawitwatch.or.id/2013/11/1486/>

kelapa sawit. Para petani dan pekerja menjadi korban dalam kasus-kasus ini karena mereka dituduh membakar dengan sengaja. Faktanya adalah bahwa mereka dibayar oleh perusahaan untuk melakukan pembakaran.

Sementara itu, banyak sungai yang penuh dengan limbah dari pabrik pengolahan minyak sawit. Sungai-sungai yang sama itulah yang masih digunakan oleh masyarakat lokal untuk minum, memasak dan mencuci pakaian.

Para petani tidak pernah diberdayakan oleh pemerintah: dalam skema-skema yang direncanakan oleh perusahaan dan pemerintah, mereka tidak pernah menjadi pengambil keputusan, hanya menjadi sasaran. Pemerintah dan industri kelapa sawit, dengan mengontrol ketersediaan penggilingan dan harga yang mereka bayarkan ke petani untuk tandan buah segar (TBS) yang mereka panen, menciptakan situasi di mana para petani menumpuk utang yang berlebihan. Banyak tanah plasma dalam skema-skema yang dijalankan perusahaan disiapkan dengan buruk

jika merujuk standar Praktik-praktik Pertanian yang Baik, sementara beberapa perusahaan sama sekali tidak membangun lahan-lahan plasma apapun, meskipun masyarakat telah melepaskan lahan mereka untuk kelapa sawit.

Para penanam kelapa sawit skala kecil terbagi menjadi dua jenis utama:

Pertama, para petani 'plasma' (penanam di luar lahan) adalah peserta dalam suatu skema yang dijalankan perusahaan di mana perusahaan tersebut mengembangkan suatu perkebunan terpusat atau 'inti' dan para petani 'plasma' mendapat alokasi lahan-lahan tempat mereka menanam kelapa sawit, dengan seluruh buahnya diproses oleh penggilingan terpusat yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut. Skema itu diatur secara eksklusif oleh pemerintah. Hal itu telah dikembangkan di Indonesia sejak 1979 melalui berbagai model kemitraan, termasuk model PIR-transmigrasi, KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) dan model Revitbun

(Revitalisasi Perkebunan), yang semuanya masih terus dipakai. Kelompok ini umumnya memenuhi kriteria berikut:

- ♦ Total area yang dialokasikan bagi para petani plasma adalah 1,3 juta ha.
- ♦ Masing-masing rumah tangga memperoleh rata-rata sekitar 0,5 ha – 2 ha.
- ♦ Produktivitas perkebunan adalah di bawah 16 ton per hektare per tahun.
- ♦ Secara teori, para petani plasma ini memperoleh harga yang lebih baik sesuai dengan ketentuan standar pemerintah (harga tersebut ditetapkan oleh sebuah tim yang mencakup baik perwakilan perusahaan maupun para petani plasma, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 17 Tahun 2010) karena mereka dapat menjual secara langsung kepada pabrik perusahaan mitra tersebut. Namun dalam praktiknya, para petani tidak memperoleh harga yang lebih tinggi.

Kedua, para petani swadaya atau petani kecil mandiri: ini adalah para petani yang menanam kelapa sawit secara swadaya dan tidak dibatasi selama mereka mengelola area sebesar kurang dari 25 ha. Total area yang ditanami oleh kelompok ini adalah kira-kira 2,8 juta ha. Mereka disebut swadaya karena para petani mengelola lahan kelapa sawit mereka mulai dari menginvestasikan modal tersebut hingga menyemai benih, menanam dan memanennya.

Sayangnya, para petani ini masih bergantung pada perusahaan besar karena panen mereka masih perlu diproses di penggilingan yang dimiliki oleh perusahaan. Para petani swadaya seringkali mengalami hal-hal berikut:

- ♦ Produksi TBS (tandan buah segar) mereka masih rendah di bawah 15 ton per hektare per tahun;
- ♦ Mereka memiliki pengetahuan yang buruk dan implementasi yang rendah tentang

standar Praktik-praktik Pertanian yang Baik dan tentang prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan;

- ♦ Mereka masih harus berhubungan dengan para perantara (mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan pabrik pengolahan perusahaan perkebunan), sehingga harga jual TBS tersebut masih di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perubahan Iklim: Sawit Watch telah menemukan bahwa dari total area perkebunan kelapa sawit sekitar 12,3 juta hektare di Indonesia, hampir 11 juta hektare ditanam di lahan gambut. Emisi karbon dari pengairan lahan gambut adalah salah satu kontributor terbesar terhadap perubahan iklim.

Tenaga kerja: Penelitian baru-baru ini oleh Sawit Watch menemukan bahwa sebuah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalimantan Timur tidak mampu membayar para tenaga kerjanya selama dua tahun. Banyak dari para tenaga kerja ini yang meninggalkan kebun tersebut karena mereka diperlakukan dengan buruk di sana.

DTE: *Di mana kasus-kasus seperti ini didokumentasikan?*

BA: Kami memiliki banyak informasi tentang kasus-kasus tertentu di dalam publikasi-publikasi kami, termasuk:

- ♦ Penelitian terhadap kondisi tenaga kerja di Kalimantan Timur
- ♦ Penelitian tentang perjanjian sewa lahan perusahaan
- ♦ Masalah-masalah Perampasan Lahan
- ♦ Gas Rumah Kaca dan Perkebunan Kelapa Sawit
- ♦ 'Raja Limbung' Seabad perjalanan sawit di Indonesia
- ♦ Tanah yang Dijanjikan
- ♦ Hantu di Tanah Kami Sendiri
- ♦ Petani Sawit Swadaya (Independent Smallholders)
- ♦ Hilangnya Tempat Berpijak

DTE: *Apa yang menjadi akar dari masalah-masalah ini menurut pandangan Anda? Perubahan seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia dan secara internasional untuk mengatasi dampak-dampak ini?*

BA: Dari sudut pandang Sawit Watch, akar dari masalah-masalah dengan perkebunan kelapa sawit ini adalah ekspansi besar-besaran yang berlangsung di sektor ini dan ketidakpedulian total terhadap hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Ekspansi ini didukung dengan berbagai cara di Indonesia. Perubahan-perubahan yang perlu terjadi di Indonesia di antaranya:

- ♦ Kebijakan yang mengatur perkebunan kelapa sawit harus membawa keuntungan bagi para petani, masyarakat lokal dan

masyarakat adat;

- ♦ Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus diwajibkan secara hukum untuk menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap tanah mereka.
- ♦ Kami membutuhkan perencanaan ruang yang diterapkan dengan baik di tingkat lokal dan nasional, untuk memastikan tidak ada lagi tumpang-tindih penggunaan lahan dan konflik kepentingan;
- ♦ Mengoptimalkan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada di Indonesia, dengan memperbaiki sistem dan manajemennya sehingga tidak ada dampak-dampak negatifnya;

Perubahan-perubahan yang diperlukan dari tingkat internasional di antaranya:

- ♦ regulasi pasar dalam bentuk kriteria keberlanjutan untuk tidak memasukkan perdagangan minyak sawit apapun yang tidak memenuhi standar lingkungan hidup dan sosial.
- ♦ pengecualian dan sanksi bagi perusahaan yang terus melakukan praktik-praktik sosial dan lingkungan hidup yang buruk dalam rantai pasokan minyak sawit.

DTE: *Adakah dampak-dampak positif dari lonjakan minyak sawit? Misalnya, apakah sebagian petani kecil dan swadaya memperoleh manfaatnya?*

BA: Satu-satunya pihak yang memperoleh keuntungan adalah mereka yang memanfaatkan sistem yang lemah dan praktik-praktik buruk dari pengoperasian kelapa sawit demi keuntungan mereka sendiri, seperti para kepala daerah, dan para kepala adat yang mau menerima suap dari perusahaan untuk ditukar dengan lahan rakyatnya. Juga, banyak orang pintar yang mengambil keuntungan dari perkebunan kelapa sawit di desa mereka, misalnya pemilik truk yang menyewakan kendaraannya ke perusahaan dan pemilik usaha warung makan yang dibangun di dalam kebun kelapa sawit, yang biasanya adalah para transmigran dari Jawa.

Permintaan minyak sawit yang tinggi di pasar nasional dan internasional tidak menghasilkan nilai positif bagi para petani swadaya. Karena para penanam ini tidak memiliki akses langsung ke pabrik pengolahan, mereka harus mengandalkan makelar yang bekerja sama dengan perusahaan swasta dan pabrik pengolahan.

DTE: *Bagaimana seharusnya Eropa mengubah kebijakannya?*

BA: Eropa harus mendukung dan memprioritaskan produksi minyak sawit dari para petani skala kecil karena mereka bertani secara berkelanjutan, dengan tingkat masalah sosial dan lingkungan hidup yang rendah, sementara perkebunan besar membawa risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi.



Buah sawit

Eropa harus membuat sebuah perencanaan untuk menghentikan penggunaan minyak sawit yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar yang mempromosikan produk-produk mereka sebagai 'hijau' (ramah lingkungan).

Eropa harus mengakui bahwa seluruh produk kelapa sawit 'hijau' yang diperoleh dari produksi industri skala besar sama sekali tidak hijau.

DTE: *Haruskah para konsumen di Eropa menghindari membeli minyak sawit, baik untuk bahan bakar atau bukan bahan bakar?*

BA: Mereka harus memiliki sistem pelacakan yang memastikan bahwa minyak sawit yang masuk ke Eropa tidak terkait dengan degradasi sosial dan lingkungan hidup. Alangkah baiknya bila dipromosikan kerja sama antara Indonesia dan UE dalam melindungi para petani mereka. Ini lebih penting ketimbang mempromosikan kepentingan para perusahaan yang menciptakan degradasi sosial dan lingkungan hidup.

DTE: *Bagaimana seharusnya para konsumen minyak sawit di Eropa menanggapi klaim dari perusahaan bahwa mereka hanya menggunakan 'minyak sawit berkelanjutan' atau bahwa produk-produk mereka disertifikasi berkelanjutan oleh RSPO?*

BA: Ada banyak perusahaan yang menjadi anggota RSPO dan yang pengoperasiannya sudah disertifikasi, tetapi mereka masih bermasalah. Perkebunan Sinar Mas di Labuan di Sumatera Utara misalnya, di mana perusahaan tersebut masih berkonflik dengan ratusan masyarakat di Kabupaten Padang Halaban. Ada begitu banyak contoh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO, tetapi masih merusak lingkungan hidup dan memperlakukan masyarakat lokal dengan

buruk. Ini berarti bahwa sertifikasi RSPO bukanlah jaminan bahwa perkebunan itu dalam praktiknya berkelanjutan secara sosial dan lingkungan hidup.

Sawit Watch ingin melihat para konsumen di Eropa berpihak dan mempertanyakan apa yang terjadi di lapangan di perkebunan kelapa sawit. Kami juga ingin melihat mereka mendorong akuntabilitas kembali secara keseluruhan melalui rantai pasokan ke perkebunan di mana minyak sawit ditanam.

DTE: *Bagaimana caranya warga Eropa yang peduli dapat menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat yang terkena dampak perluasan kelapa sawit?*

BA: Anda dapat membangun kerja sama strategis yang, dalam jangka waktu pendek, akan memonitor dan menilai keterlaksanaan minyak sawit yang dijual di Eropa, mengungkap klaim-klaim palsu terhadap keberlanjutan minyak sawit yang diperoleh dari perkebunan yang dibangun dengan mengorbankan tanah masyarakat untuk menanam pangan. Tujuan jangka panjang dari kerja sama ini dapat berupa memperkuat posisi para petani kelapa sawit mandiri berskala kecil, sehingga produk-produk mereka dapat dijual secara langsung ke pasar secara swadaya. Anda juga dapat membangun rencana jangka panjang yang ditujukan untuk mengubah pasar tersebut.

DTE: *Perusahaan minyak sawit mengklaim mereka mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja dan menciptakan pendapatan untuk pembangunan Indonesia; haruskah kami mempercayai mereka?*

BA: Mengurangi kemiskinan? Tidak juga. Enam puluh persen pekerja di sektor minyak sawit adalah buruh harian. Upah dari para pekerja pertanian bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Buruh anak juga digunakan dan para

perempuan juga dipaksa bekerja di perkebunan karena itulah satu-satunya jalan untuk memperoleh cukup uang untuk bertahan hidup.

Berbicara mengenai kemiskinan, kita sebaiknya membuat sebuah perbandingan 'sebelum dan sesudahnya' terhadap daerah yang ditanami kelapa sawit. Sebelumnya, masyarakat lokal tidak perlu membeli beras, cabe, sayur-mayur, dan pangan lokal lainnya untuk keperluan sehari-hari. Setelahnya, mereka perlu membeli semua bahan makanan ini. Ya, pendapatan mereka meningkat, tetapi begitu juga kebutuhan uang tunai mereka.

Menciptakan pendapatan untuk pembangunan Indonesia? - kita perlu memiliki data yang lebih banyak tentang ini, karena tidak ada catatan tentang pendapatan riil di tingkat lokal yang menunjukkan angka-angka pasti yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit seharusnya tidak dibangun di hutan-hutan - kita tidak bisa menyebutnya pembangunan jika hal ini terjadi.

Para penanam kelapa sawit yang menjadi 'mitra' dalam skema-skema perusahaan tidak menjadi lebih baik; beberapa alasannya adalah:

- ♦ Dari harga TBS yang terutang ke para petani, perusahaan menguranginya dengan jumlah biaya operasional dari perkebunan (sekitar 300-400 rupiah per kg)
- ♦ Proses menyortir buah sawit dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan tidak transparan.
- ♦ Biaya transportasi - karena infrastruktur yang tidak baik - ditanggung oleh para petani
- ♦ Berdasarkan skema baru yang disebut "Manajemen Satu Atap", keseluruhan biaya pemeliharaan daerah perkebunan 'plasma' dikurangi oleh perusahaan (sekitar 50 % dari harga TBS). Selanjutnya 30% lagi dikurangi untuk membayar utang para petani, sehingga berarti hanya 20% yang masuk ke para petani.
- ♦ Banyak petani kecil memperoleh alokasi lahan kurang dari yang mereka serahkan ke perusahaan. Misalnya, dalam kasus PT MAS II dan BKP di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sekitar 21% dari para petani kelapa sawit memiliki lahan kurang dari 2 ha, meskipun mereka menyerahkan lebih dari 2 ha lahan mereka ke perusahaan tersebut.

DTE: *Bagaimana dengan situasi energi terbarukan di Indonesia? Haruskah minyak sawit Indonesia digunakan untuk pangan dan energi di Indonesia ketimbang diekspor ke Eropa dan negara-negara lainnya?*

BA: Penggunaan energi terbarukan di Indonesia telah diwajibkan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, dengan mempromosikan pengembangan perkebunan



Pemuatan buah sawit, Riau (foto: DTE)

yang menanam tanaman untuk energi, seperti jatrophia dan kelapa sawit. Mereka menyadari bahwa bahan bakar fosil di Indonesia hanya akan bertahan hingga 12 tahun lagi, menurut Daulay Mustafa, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Oleokimia Indonesia (APOLIN). Satu-satunya masalah adalah, dengan membangun sebuah industri energi terbarukan yang berbasis di perkebunan kelapa sawit berarti kita memiliki masalah lingkungan hidup dan sosial yang sama.

Berdasarkan penggunaan kelapa sawit itu sendiri, pemerintah tidak menetapkan persentase atau membuat pemisahan apapun antara penggunaan akhir untuk pangan dan energi.

Sawit Watch merasa kita pertama-tama perlu menetapkan sistem yang telah diperbaiki dan praktik-praktik yang baik di industri kelapa sawit sebelum kita mempertimbangkan untuk memilih antara penggunaan pangan atau energi. Kita perlu memprioritaskan untuk memastikan perbaikan dalam sistem dan praktik tersebut sehingga tidak ada konflik lingkungan hidup atau sosial. Adalah salah bila mulai berbicara tentang pilihan-pilihan ini sebelum menangani masalah-masalah utamanya dan pada saat ada begitu banyak kasus tak terselesaikan dari konflik di sektor ini. Mengenai ekspor minyak sawit ke Eropa dan negara-negara lainnya, Sawit Watch merasa bahwa Indonesia sebaiknya pertama-tama menghitung siapa yang paling banyak memperoleh keuntungan dari ekspor tersebut. Jika satu-satunya pihak yang memperoleh keuntungan adalah perusahaan-perusahaan besar, sementara para

petani dan penanam kecil tidak memperoleh apa-apa, akan lebih baik untuk berpikir dua kali untuk mengeksport minyak sawit Indonesia.

DTE: *Bagaimana masyarakat di Eropa menanggapi pesan-pesan ini sejauh ini?*

BA: Hingga saat ini, Eropa hanya memandang bahan bakar nabati sebagai suatu alat untuk mengurangi emisi karbon; masyarakat belum melihat gambaran secara keseluruhan: bagaimana bahan bakar nabati diproduksi. Eropa sebaiknya lebih terbuka untuk mencermati apa yang terjadi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan negara-negara lainnya. Dan, di skala global, banyak pemangku kepentingan tidak sepenuhnya menyadari mengenai kondisi para pekerja perkebunan, para petani (kecil) dan masyarakat adat di Indonesia. Ada sejenis egoisme, atau kompetisi di antara sektor lingkungan hidup dan sosial: kadang-kadang pertimbangan lingkungan hidup diperhatikan tetapi masalah-masalah sosial diabaikan. Namun, dalam kasus perkebunan kelapa sawit di Indonesia, masalah-masalah yang lebih menekan adalah masalah sosial, yang terkait dengan kondisi bagi masyarakat di dalam dan di sekitar perkebunan tersebut.

DTE: *Apakah Anda punya pesan lainnya untuk pemerintah, perusahaan atau masyarakat sipil Eropa?*

BA: Menggunakan energi terbarukan adalah sebuah gagasan yang cemerlang dan mulia

dalam kaitan untuk menyelamatkan dunia dari bencana iklim global, tetapi kita perlu mempertimbangkan bagaimana energi terbarukan itu dibuat dan dari mana ia berasal. Tanyakan apakah energi terbarukan itu berasal dari tanaman yang secara langsung atau tak langsung menggusur hutan, lahan gambut, atau mengambil alih tanah masyarakat adat. Cari tahu apakah energi terbarukan atau bahan bakar nabati yang sedang Anda pakai dan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan impor dari negara-negara seperti Indonesia hanyalah sekadar melayani kepentingan bisnis besar dengan cara yang baru dan kreatif, sambil mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan bencana global.

www.sawitwatch.or.id ♦



Dukung Petisi 35!

AMAN sedang mengumpulkan tanda tangan dari kelompok dan individu untuk mendukung sebuah petisi untuk percepatan implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35, 2013.

Ini adalah keputusan yang menegaskan kembali bahwa hutan adat adalah hutan yang terletak di dalam wilayah adat dan seharusnya tidak bisa lagi dianggap sebagai hutan negara

Tanda tangan untuk mendukung petisi ini di <http://www.aman.or.id/bahasa-indonesia/>



AMAN menuduh perusahaan kelapa sawit dan pulp atas deforestasi yang merajalela

Meskipun ada kemajuan dalam kebijakan internasional dan kerangka pengaturannya, meskipun ada komitmen-komitmen dari para pemimpin politik, keuangan dan industri, bisnis ini bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang merajalela untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu, mencuri dari masyarakat adat, menyerobot tanah dan sumber daya mereka, dan menghancurkan budaya dan identitas mereka.

Inilah pesan yang didengar oleh para perwakilan bisnis dan pemerintah yang menghadiri sebuah lokakarya di Jakarta pada bulan Juni, untuk Mempromosikan Keberlanjutan dan Produktivitas Sektor Kelapa Sawit dan Pulp & Kertas. Pesan tersebut disampaikan oleh Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN, aliansi masyarakat adat Indonesia.

Dengan mengutip secara langsung seorang pemimpin adat masyarakat Muara Tae Dayak Benuaq di Kalimantan Timur, Nababan mengingatkan mereka yang menghadiri lokakarya bulan Juni tersebut bahwa tingkat deforestasi Indonesia masih lebih dari 1,5 juta hektare per tahun. Ini, katanya, berhubungan dengan 74% emisi CO₂ negara Indonesia, meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji untuk mengurangi emisi Indonesia menjadi 26%. Pemusnahan hutan-hutan adat dan mengubahnya menjadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit, dengan pelanggaran sepenuhnya terhadap standar-standar hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat, dan hukum pidana Indonesia sendiri, tengah terjadi saat ini di Muara Tae di Kalimantan Timur, katanya, dan di banyak tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu korupsi dan tindak pidana kehutanan semakin buruk saja, dan kebakaran-kebakaran hutan terus mencekik sebagian besar wilayah Sumatera, Malaysia dan Singapura setiap tahun.

Dengan mengacu pada sebuah 'fajar bagi hutan adat di Indonesia' yang baru berkat keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan hutan adat dari hutan negara,¹

Nababan mengatakan akan menjadi tugas masyarakat adat untuk 'mengalahkan kinerja' lembaga-lembaga negara dalam mencegah deforestasi serta membagikan 'pengetahuan mereka yang telah berusia ratusan tahun tentang bagaimana memelihara dan melindungi hutan-hutan kita.'

"Tugas kalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, adalah untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat adat terhadap kegiatan-kegiatan investasi dan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah kami. Ini akan membutuhkan kesabaran, niat baik Anda, dan sebuah kerangka kerja untuk persetujuan yang sejati yang didasari pada informasi yang lengkap, transparansi dan pada akhirnya penerimaan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, terhadap hak masyarakat adat untuk mengatakan TIDAK pada model-model pembangunan yang merusak yang merugikan kita semua dan ibu pertiwi."

(Sumber: Aliansi Hutan Tropis 2020 (Tropical Forest Alliance 2020): Lokakarya Mempromosikan Keberlanjutan dan Produktivitas Sektor Kelapa Sawit dan Pulp & Kertas, Jakarta 27 Juni 2013. Pernyataan dari Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Catatan:

1. Untuk latar belakang, lihat 'A turning point for Indonesia's indigenous peoples, DTE update, 7/Jun/2013, <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/turning-point-indonesia-s-indigenous-peoples>
2. 'Indonesian villagers sue president over climate change', Diane Parker, Mongabay-Indonesia, 11/Sep/2013. <http://news.mongabay.com/2013/0911-dparker-villagers-sue-indonesian-president.html>
3. "Mengabaikan Lingkungan Hidup dan Melupakan Rakyat, WALHI Gugat Presiden dan 18 Jajarannya' WALHI, 9 Oktober 2013, <http://www.elsam.or.id/article.php?id=2694&lang=en> ♦

Presiden SBY dituntut oleh para penduduk desa di Riau, WALHI

Pada hari yang sama ketika para Anggota Parlemen Eropa memberikan suara mengenai amendemen bahan bakar nabati di Eropa, delapan penduduk desa dari Riau — salah satu pusat kelapa sawit Indonesia dan sebuah wilayah yang telah menderita akibat kebakaran hutan yang mencekik — menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mongabay melaporkan bahwa pada tanggal 11 September para penduduk desa menuntut Presiden dan sejumlah pejabat lainnya atas dampak-dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di provinsi tersebut.

Mereka mengatakan mereka telah mengalami masalah kesehatan, mengalami kerugian keuangan, dan menyaksikan merosotnya kualitas hidup mereka karena pembabatan hutan dan lahan gambut. Mereka menyalahkan perusahaan-perusahaan kayu dan perkebunan atas kerusakan hutan dan lahan gambut Riau.

Tuntutan hukum para penduduk desa yang didukung oleh ornop lokal Jikalauhari, Telapak Riau dan Indonesian Center for Environmental Law (Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia atau ICEL) juga menuntut Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, serta Gubernur provinsi Riau.²

Bulan berikutnya, WALHI (Wahana Lingkungan Indonesia) juga mengumumkan bahwa mereka sedang menuntut Presiden SBY. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 9 Oktober menyatakan bahwa kelompok tersebut memasukkan gugatan terhadap SBY dan 19 pembantunya terkait kebakaran hutan yang terus menerus terjadi di Sumatera.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, mengatakan kelompoknya mengambil tindakan ini terhadap Presiden "untuk mengingatkan beliau dan jajaran pemerintahannya akan kewajiban konstitusi mereka untuk melindungi lingkungan hidup Indonesia dan hak-hak rakyatnya akan lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

WALHI juga menunjuk perkebunan — khususnya perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp — sebagai penyumbang utama terhadap situasi lingkungan hidup yang memburuk di Sumatera. Musim yang telah sekian lama menjadi rujukan bagi pertanian dan tradisi masyarakat telah berganti menjadi musim-musim malapetaka dengan banjir, kabut asap dan krisis pangan dan air menjadi sebuah peristiwa tahunan, dengan membawa penderitaan pada masyarakat, katanya.³



Kenapa jangan Wilmar?

Nama Wilmar tampak besar dalam urusan bahan bakar nabati Eropa-Indonesia. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini menjual biodiesel buatan Indonesia ke Eropa serta menjual bahan baku kelapa sawit untuk membuat biodiesel di Eropa. Wilmar adalah sebuah perusahaan yang terkait dengan serangkaian permasalahan HAM dan lingkungan paling tidak sejak 2005.¹ Yang paling akhir, empat orang penduduk desa dilukai oleh penjaga keamanan di salah satu konsesi Wilmar di Kalimantan Tengah, dalam sebuah konflik lahan yang berkepanjangan yang melibatkan perusahaan. Catatan buruk Wilmar menyoroti alasan mengapa Eropa seharusnya tidak bergantung pada minyak sawit Indonesia untuk memenuhi komitmen bahan bakar dan energi terbarukannya.

Wilmar Internasional adalah sebuah perusahaan global yang terlibat dalam penanaman, penggilingan, penyulingan dan perdagangan kelapa sawit dan berbagai jenis produknya.² Wilmar merupakan pedagang kelapa sawit terbesar dunia yang memasok sebanyak 45% dari minyak sawit yang diperdagangkan di dunia.³ Perusahaan tersebut juga merupakan salah satu pemilik perkebunan terbesar di Indonesia dan Malaysia. Total wilayah yang ditanami kelapa sawit Wilmar adalah sekitar 255.648 hektare, di mana sekitar 73% terletak di Indonesia, 23% di Sabah dan Sarawak di Malaysia dan 4% di Afrika. Ditambah 41.407 ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola Wilmar berdasarkan skema 'plasma' Indonesia yang banyak menuai kritik.⁴ Area ini akan bertambah luas: perusahaan tersebut dilaporkan telah memiliki simpanan lahan dengan luas lebih dari 600.000 hektare, khususnya di Malaysia, Sumatera dan Kalimantan.⁵

Selain menjadi pemain yang dominan di sisi penawaran dari industri minyak sawit, perusahaan tersebut juga memainkan peran penting di bagian hilir usaha ini yakni dalam penyulingan dan pengolahannya. Di Eropa, perusahaan tersebut mengoperasikan penyulingan di Belanda dan Jerman, yang tercatat dalam laporan tahunan terakhirnya sebanyak empat pabrik penyulingan dan satu pabrik khusus lemak di Eropa.⁶

Wilmar dikuasai oleh pengusaha Indonesia dan Singapura, dengan perwakilan di dewan direksinya oleh Archer Daniels Midland (ADM) salah satu perusahaan perdagangan komoditas terbaik dunia, yang juga tercatat di antara duapuluh besar pemegang saham terbesar Wilmar. ADM dan Wilmar telah membentuk sebuah kerjasama strategis, termasuk penyulingan minyak tropis di Eropa (dijual dan dipasarkan melalui Olenex. C.V. yang berbasis di Swiss).⁷

Besar dalam biodiesel

Wilmar juga merupakan pembuat biodiesel terbesar di Indonesia dan produsen biodiesel terbesar dunia yang dibuat dari kelapa sawit. Pada 2012, kapasitas produksinya mencapai 2 juta ton per tahun, dari 7 penyulingan di



Perkebunan Asiatic Persada, Jambi, dulu milik Wilmar; sekarang sudah dijual meskipun sengketa dengan masyarakat belum terselesaikan.

Indonesia dan satu di Malaysia,⁸ walaupun produksinya diperkirakan di bawah kapasitas.⁹

Dalam laporan publiknya Wilmar tidak menyatakan di mana biodieselnnya dijual, tapi jelas dari langkah-langkah anti-dumping yang diambil Uni Eropa terhadap para pengeksport biodiesel Indonesia dan Argentina bahwa sejumlah besar produksi Wilmar dijual di Eropa. Dalam bulan Mei tahun ini, UE mengumumkan hukuman pajak akan dikenakan pada impor dari lima perusahaan Indonesia termasuk dua produsen biodiesel Wilmar, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Wilmar Bioenergi. Perusahaan-perusahaan tersebut dituduh menjual biodiesel yang disubsidi di pasar Eropa, dan Wilmar menerima kewajiban yang bersifat hukuman itu tertinggi di antara perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya, yakni 9.6%.¹⁰

Di Indonesia, tindakan anti-dumping UE disambut dengan cemas, khususnya karena itu berarti ketidakpastian lebih lanjut untuk para produsen biodiesel Indonesia (permintaan domestik terhadap biodiesel tetap kecil). UE adalah tujuan ekspor utama untuk biodiesel Indonesia – mencakup hampir 90% dari volume ekspor sejauh ini, menurut kepala asosiasi biodiesel Indonesia, Aprobi.¹¹ Industri dan para pejabat pemerintah sama-sama setuju bahwa permintaan terkait langsung dengan mandat-mandat energi terbarukan dan bahan bakar.¹²

Indonesia juga merupakan pemain besar dalam kaitan dengan jumlah impor biodiesel ke UE. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh UFP/Ecofys,¹³ negara-negara UE secara keseluruhan mengimpor sekitar 2,27 juta ton biodiesel pada 2011 dimana 90% dari impor tersebut berasal hanya dari dua negara saja: Argentina dan Indonesia. Porsi Indonesia berjumlah 895.000 ton.¹⁴

Ketika angka-angka ini dibandingkan dengan angka produksi dan ekspor pemerintah Indonesia menjadi jelas juga bahwa kebanyakan biodiesel yang diproduksi Indonesia, apalagi sebagian besar produk untuk ekspor, dijual di Eropa. Pada 2011, misalnya, Indonesia memproduksi sedikit di bawah 1,6 juta ton (1.812.000 kl) biodiesel yang mana 80% atau 1,28 juta tonnya (1.453.000 kl) diekspor.¹⁵ Porsi Indonesia dari impor UE – 895.000 ton – mewakili 70% dari ekspor, atau di atas setengah dari total produksi tahun itu.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa:

- ♦ UE merupakan tujuan utama bagi ekspor biodiesel Indonesia,
- ♦ Wilmar merupakan produsen biodiesel terbesar Indonesia,
- ♦ Wilmar, bersama tiga pengeksport utama Indonesia lainnya memasok hingga 95% ekspor biodiesel Indonesia,¹⁶

- ♦ Wilmar memiliki basis operasional di Eropa, tampaknya cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa sejumlah besar biodiesel yang diproduksi oleh Wilmar dikonsumsi di negara-negara Eropa.



Tangki penyimpanan minyak sawit (Foto: DTE)

Bahan baku Biodiesel

Selain itu, Wilmar disebut-sebut dalam penelitian yang dilakukan oleh Proforest sebagai pemasok utama bahan mentah bagi pembuatan biodiesel berbasis minyak sawit di dalam UE.¹⁷ Sekali lagi, tidak ada angka yang memerinci tingkat kontribusi Wilmar terhadap bahan baku kelapa sawit yang digunakan untuk membuat biodiesel oleh para produsen UE, tapi mengingat kemasyhuran Wilmar dalam perdagangan minyak kelapa sawit, dan kehadirannya di Eropa, dan fakta bahwa penelitian memperlihatkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap minyak impor minyak sawit untuk biodiesel secara umum di UE, adalah beralasan untuk mengasumsikan Wilmar memainkan sebuah peran sangat penting di Eropa juga.

Menurut penelitian dari Institut untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (IISD) yang berbasis di Jenewa untuk Friends of the Earth Eropa, impor minyak sawit UE pada 2012 mencapai 5,6 juta – 6,3 juta ton.¹⁸ Jumlah total yang digunakan untuk membuat biodiesel adalah 1,9 juta ton,¹⁹ sementara 0,6 juta ton lainnya digunakan untuk pembangkit listrik dan pemanas.²⁰

IISD menemukan bahwa impor minyak sawit untuk memproduksi biodiesel telah meningkat dengan tajam yakni 365% antara tahun 2006 sampai 2012, dari 240.000 ton pada 2006 menjadi 1,9 juta ton pada 2012. Dari total peningkatan impor minyak sawit selama periode itu (sekitar 1,9 juta ton)

(bersambung ke hal 15)

Di Eropa

Kemana biodiesel ini berlabuh? Dengan mencermati bisnis akhirnya di Eropa, penelitian IISD memperlihatkan bahwa di antara negara anggota UE, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Finlandia dan Perancis semuanya merupakan konsumen besar dari produksi biodiesel pada 2012 (lihat tabel) dan ketiga negara pertama juga menggunakan minyak sawit untuk pembangkit listrik dan pemanas. Konsumsi Inggris, di sisi lain, sebenarnya telah berkurang menjadi 37% sejak 2006.

Belanda merupakan pengimpor minyak sawit terbesar Eropa, memang sebagian besar impor UE terhadap semua jenis minyak yang dapat dimakan, lemak dan oleokimia memasuki Eropa melalui pelabuhan Rotterdam di Belanda,²² di mana di sana juga terdapat beberapa penyulingan besar, termasuk penyulingan berkapasitas 750.000 ton/tahun yang dioperasikan oleh Wilmar.²³

Pemakaian akhir minyak sawit 2006-2012 (metrik ton)²⁴

Negara	Produksi biodiesel	Pembangkit listrik dan pemanas
Belanda	480.000	250.000
Jerman	300.000	150.000
Italia	220.000	190.000
Spanyol	200.000	-
Finlandia	200.000	-
Inggris	38.000	-

Wilmar dan para pemegang sahamnya

Wilmar didirikan pada tahun 1991 dengan simpanan tanah seluas 7.100 hektare di Sumatera. Sejak itu Wilmar telah berkembang pesat menjadi pedagang kelapa sawit terbesar dunia. Sebagai pemain utama di bursa saham Singapura, perusahaan tersebut memasarkan dirinya sebagai grup agribisnis Asia terdepan. Dewan direksi yang semuanya pria itu terdiri dari para pebisnis Singapura dan Indonesia, serta Juan Luciano dari ADM, Martua Sitorus, anggota dewan dari Indonesia, dan pemegang saham utama Wilmar, merupakan orang terkaya ketujuh Indonesia, dengan perkiraan kekayaan 2 milyar dolar AS. Dia juga berada di peringkat 736 dalam daftar orang terkaya dunia yang dikeluarkan Forbes.²⁵

Berdasarkan informasi di lamannya, www.wilmar-international.com, perusahaan itu sekarang adalah:

- ♦ Pemroses dan pembuat minyak sawit dan laurat terbesar dunia, serta terbesar dalam penyulingan dan fraksionasi minyak yang dapat dimakan, oleokimia, lemak khusus dan biodiesel sawit
Pembuat minyak kemasan terbesar di seluruh dunia
- ♦ Salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar dan penyuling minyak sawit terbesar di Indonesia dan Malaysia
- ♦ Salah satu penghancur biji minyak, penyuling minyak yang dapat dimakan, pembuat lemak khusus dan oleokimia, dan penggiling tepung dan beras terbesar di Cina
- ♦ Salah satu di antara 10 produsen gula mentah utama dunia serta produsen dan penyuling gula mentah terbesar, dan pembuat terkemuka merk dagang gula dan pasar pemanis tambahan di Australia
- ♦ Produsen minyak kemasan dengan merek terkemuka, penghancur biji minyak dan penyuling minyak yang dapat dimakan yang terkemuka di India
Pengimpor terkemuka minyak yang dapat dimakan ke Afrika Timur dan Afrika Selatan
Salah satu penyuling minyak yang dapat dimakan yang terbesar di Ukraina.²⁶

Bank-bank besar di antara para pendana Wilmar

Penelitian oleh Friends of the Earth International telah menyoroti para pemberi dana Wilmar dari AS dan Eropa, termasuk para pemegang saham dan bank yang memberi pinjaman kepada perusahaan tersebut. Mereka ini di antaranya adalah bank-bank besar Inggris Barclays dan HSBC, PNB Parisbas dan Credit Agricole (Perancis), Deutsche Bank (Jerman), APB dan Rabobank (Belanda) dan Bank of America, J Morgan, Goldman Sachs, Citigroup dan lain-lain di AS, serta lembaga-lembaga Kanada, Swiss dan Belgia.²⁷

FoE juga mencatat bahwa Norwegian Pension Fund (GPF) menarik kembali investasinya di Wilmar pada 2012, juga dari 22 perusahaan minyak sawit lainnya, karena mereka meyakini para perusahaan itu memproduksi minyak sawit secara tidak berkelanjutan dan secara serius menyebabkan dampak-dampak hak asasi manusia yang buruk.²⁸

80% dapat dikaitkan dengan pertumbuhan produksi biodiesel, sementara 10% selanjutnya tercakup dalam pertumbuhan impor minyak sawit untuk pemanas dan pembangkit listrik. Sisa 10% dicakup dalam sektor lain, terutama sektor pangan. Ini mengindikasikan bahwa insentif-insentif bahan bakar nabati Eropa, sebagaimana dikhawatirkan, mempromosikan peningkatan dalam pemakaian minyak sawit. Dan jalan meningkat ini boleh jadi akan berlanjut kecuali bila panduan-panduan bahan bakar hayati UE diamandemen secara efektif.²¹

Permintaan lebih banyak di Eropa akan bahan bakar terbarukan, jelas, berarti lebih banyak lagi impor minyak sawit dari Indonesia, yang pada akhirnya mendorong produksi biodiesel dan minyak sawit di Indonesia, dan mempromosikan ekspansi sektor kelapa sawit di Indonesia. Wilmar adalah salah satu dari perusahaan yang berekspansi dengan pesat tersebut — tahun lalu saja perusahaan itu memperluas area yang ditanami yang dikelola langsung oleh perusahaan tersebut sebesar 8.567 hektare dan menambah 3.386 hektare lagi untuk area perkebunan plasmanya, dengan sebagian besar ekspansi tersebut berada di Indonesia. Dan minyak sawit dari kebun perusahaan sendiri hanyalah berjumlah kecil dibandingkan volume yang dibeli Wilmar dari perusahaan-

perusahaan lain. Bagian ini dari bisnis perusahaan tersebut (pembelian bahan dari perusahaan lain) telah berkembang dengan pesat sehingga sekarang mencakup hampir setengah dari seluruh minyak sawit yang diperdagangkan secara global. Jadi pertanyaannya, kenapa bukan Wilmar? Apa saja implikasi yang ditimbulkan dari perkebunan perusahaan ini yang meluas dengan pesat maupun pembelian minyak sawit terhadap masyarakat Indonesia dan lahan serta mata pencaharian mereka?

Kinerja Wilmar

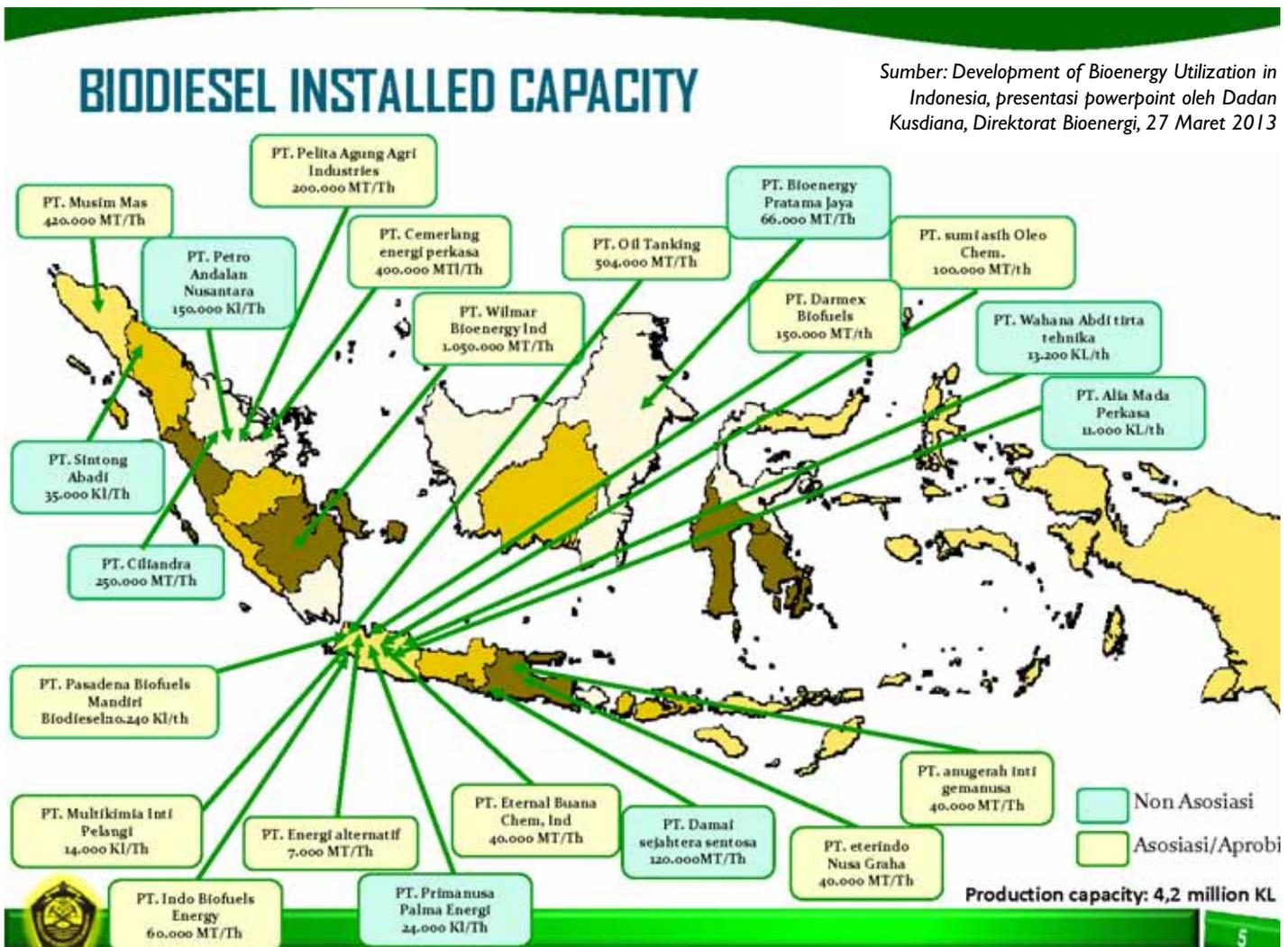
Pengoperasian Wilmar beserta dampak-dampak negatifnya yang meluas terhadap komunitas-komunitas lokal di Indonesia, sumber daya mereka dan lingkungan hidup di Indonesia telah menjadi subyek penyelidikan dan perlawanan yang terus-menerus dari para ornop Indonesia dan internasional selama bertahun-tahun. Berbagai komunitas dan OMS telah menyampaikan keprihatinan mereka ke Forum Meja Bundar tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO), di mana Wilmar adalah anggota terkemukanya. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan tersebut memikul tanggung jawab terhadap kegagalan mereka memenuhi komitmennya untuk memenuhi syarat sertifikasi rantai pasokan

‘minyak sawit berkelanjutan’ dari RSPO. Wilmar International memiliki 9 sertifikasi yang berlaku yang tercatat di laman RSPO, sementara 14 sertifikasi berikutnya tercatat sudah tidak berlaku (termasuk dua untuk PT Wilmar Bioenergi Indonesia).²⁹ Sementara itu, serangkaian pengaduan formal, yang diajukan oleh Forest Peoples Programme (FPP) dan Sawit Watch, ditujukan kepada sayap sektor swasta dari Bank Dunia, Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation - IFC), dari mana Wilmar menerima dukungan keuangan yang substansial.³⁰ Dalam hal ini, IFC dituduh melanggar prinsip-prinsip investasinya dengan memberikan pendanaan bagi Wilmar.

Pengaduan-pengaduan yang ditujukan pada CAO/IFC mencakup kasus-kasus tertentu berikut:

Tiga anak perusahaan Wilmar di **Kalimantan Barat** dan satu **Sumatera Barat** (pengaduan bertanggal 18 Juli 2007).³¹ Perusahaan tersebut ditemukan terlibat dalam

- ♦ melakukan pembakaran secara ilegal untuk membersihkan lahan, pembabatan hutan primer,
- ♦ pembabatan wilayah dengan nilai konservasi tinggi,
- ♦ pengambilalihan tanah adat dari



Sumber: Development of Bioenergy Utilization in Indonesia, presentasi powerpoint oleh Dadan Kusdiana, Direktorat Bioenergi, 27 Maret 2013

masyarakat adat tanpa proses yang adil,

- ♦ kegagalan untuk melaksanakan konsultasi atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan dengan masyarakat adat,
- ♦ kegagalan untuk bernegosiasi dengan komunitas atau mematuhi perjanjian yang telah dirundingkan,
- ♦ kegagalan untuk membentuk wilayah-wilayah plasma yang telah disetujui,
- ♦ konflik-konflik sosial yang memicu aksi-aksi represif oleh perusahaan dan pasukan keamanan
- ♦ kegagalan untuk melaksanakan atau menunggu persetujuan dari dampak lingkungan hidup yang diwajibkan secara hukum
- ♦ pembabatan gambut dan hutan tropis tanpa izin yang diwajibkan secara hukum.

Anak-anak perusahaan di Kalimantan Barat, PT Wilmar Sambas Plantation (WSP), Buluh Cawang Plantation (BCP) dan Agro Nusa Investama (ANI) melanggar kebijakan tanggung jawab sosial korporat dari Wilmar sendiri, hukum Indonesia dan Prinsip-prinsip dan Kriteria dari RSPO, di mana Wilmar sudah menjadi anggotanya sejak 2005. Komunitas lokal yang terkena dampak dari perkebunan Wilmar menuntut agar perusahaan menghentikan operasi di lapangan sementara dilakukan AMDAL yang sesuai dan menyeluruh dan agar ada proses konsultasi yang transparan untuk memperoleh persetujuan dari komunitas tersebut untuk memperoleh lahan.

Meskipun ada keluhan yang diangkat oleh para ornop mengenai operasi Wilmar, IFC melakukan tiga investasi pada kelompok tersebut dan membantunya memperoleh dana melalui Fasilitas Lingkungan Hidup Global (Global Environmental Facility). Tindakan tersebut menunjukkan bahwa IFC tidak melaksanakan uji tuntas (due diligence) dan tidak mempedulikan Standar Kinerja IFC sambil dengan keliru menyatakan bahwa Wilmar memenuhi standar-standar RSPO. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan instruksi pada April 2007 kepada PT WSP dan BCP untuk menghentikan seluruh operasi hingga AMDAL tuntas dilakukan dan disetujui, tetapi hal ini diabaikan. PT ANI terus mengoperasikan pabrik pemrosesan dan memperluas perkebunannya tanpa adanya AMDAL.³²

Berdasarkan prosedur pengaduan itu, dilakukan prosedur penyelesaian sengketa dengan hanya dua dari komunitas-komunitas yang terkena dampaknya, Senujuh dan Saginang Kecil di Sambas, dengan mediasi oleh CAO, yang menetapkan beberapa preseden yang baik, meskipun beberapa masalah masih ditangani di lapangan.³³

Riau dan Jambi: pengaduan kedua disampaikan pada 19 Desember 2008 ketika para ornop mengetahui bahwa IFC memberikan dukungan lebih lanjut untuk Wilmar tanpa uji tuntas. Pengaduan itu mencatat 19 operasi Wilmar lainnya yang

Ketiga produsen biodiesel lainnya yang mengekspor ke Eropa

Ketiga produsen biodiesel selain Wilmar yang muncul dalam investigasi anti-dumping UE.

Produsen Biodiesel	Kelompok/ perusahaan induk	Biodiesel	Lokasi & perkebunan	Sertifikasi RSPO & informasi lainnya
PT Cilandra Perkasa	Anak perusahaan First Resources Ltd, Singapura.	Kapasitas: 250.000 ton/tahun. Kelompok tersebut memiliki pabrik penyulingan dan fraksinasi yang berlokasi di Dumai, provinsi Riau, dekat pelabuhan Dumai dan dengan mudah dapat diakses dari kilang minyak sawit yang ada. Pabrik biodiesel itu memungkinkan kelompok tersebut memproduksi biodiesel berbasis sawit, dengan menggunakan Stearin sebagai bahan baku.	Seluruh perkebunan berbasis di provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Dengan lebih dari 146.000 hektare yang ditanami dan "simpanan tanah yang cukup luas untuk penanaman baru yang sedang berlangsung", kelompok itu mengklaim memimpin posisi dalam industri kelapa sawit Indonesia. Dua belas kilang yang ada memiliki kapasitas pemrosesan total sebesar 4.050.000 ton tandan buah segar (TBS) per tahun. Pada TA2012, perusahaan tersebut memproduksi 525.831 ton CPO.	Di laporan keberlanjutan 2011, perusahaan tersebut secara khusus menyebut Panduan RED dari UE sebagai sebuah kesempatan untuk menjual biodiesel. "Melalui Panduan Energi Terbarukan, Uni Eropa mensyaratkan 10 persen solar dan bensin diperoleh dari sumber-sumber terbarukan pada 2020. Untuk First Resources, ini adalah sebuah kesempatan untuk memproduksi biodiesel bersertifikasi berkelanjutan untuk memenuhi permintaan global yang berkembang terhadap energi ramah lingkungan. First Resources adalah anggota RSPO tetapi tak ada satupun operasinya yang sudah bersertifikasi. Detail lebih lanjut tentang operasi perusahaan tersebut ada di dalam laporannya ke RSPO http://www.rspo.org/sites/default/files/ACOP2012_GRW_1-0047-08-000-00-2.pdf
PT Musim Mas Medan	Laman perusahaan terlihat belum diperbarui sejak 2006.	Kapasitas 120.000 ton/thn, menurut ESDM. Menurut Profundo, 2009, pada 2007 Musim Mas membuka pabrik biodiesel pertamanya di Medan, dengan kapasitas tahunan sebesar 200.000 ton. Pabrik kedua di pulau Bangka, dengan kapasitas tahunan sebesar 350.000 ton, masih dalam pembangunan. Pembukaan direncanakan pada kuartal pertama 2009.	Menurut laporan terakhir ke RSPO, perkebunan perusahaan ada di Riau dan Kalimantan Barat, dengan 24.011 ha ditanami, plus 1.683 ha kebun plasma.	Semua perkebunan bersertifikasi
PT Pelita Agung Agrindustri	Permata Hijau Group, berbasis di Medan, Sumatera Utara.	Pabrik biodiesel di Dumai, Riau. Kapasitas 200.000 ton/tahun.	Terdaftar sebagai pemroses dan pedagang oleh RSPO (perusahaan tersebut adalah anggotanya).	Laporan RSPO terakhir: belum ada produk yang bersertifikasi, tetapi bertujuan mencapai 100% sertifikasi.

Sumber: http://www.musimmas.com/corp_prof.html; German Banks in the palm oil sector; Platform Sustainable Biomass, Profundo, 2009, Jan Willem van Gelder, Profundo, www.profundo.nl, April 2009; http://www.permatagroup.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

bermasalah dan mendesak CAO/IFC mengatasi masalah-masalah sistemik dalam rantai pasokan Wilmar. Namun CAO/IFC sebaliknya memilih untuk menangani hanya beberapa kasus tertentu. Ada kemajuan dalam satu dari dua kasus yang diangkat, di mana CAO menetapkan proses mediasi, yakni **PT Citra Riau**, terkait dengan masyarakat Pangean di Riau. Sayangnya, dalam kasus yang lain, **PT Asiatic Persada**, di Jambi, masalah yang serius tetap ada antara masyarakat Batin Sembilan dan perusahaan. Perusahaan tersebut, yang dulu dimiliki oleh sayap investasi sektor swasta dari lembaga bantuan luar negeri Inggris (CDC),³⁴ diidentifikasi telah menyebabkan konflik yang paling lama terjadi pada perusahaan kelapa sawit yang

beroperasi di provinsi Jambi.³⁵ Pada Agustus 2011, upaya-upaya untuk menggusur masyarakat lokal dari wilayah mereka di Sungai Beruang membuat 80 rumah dihancurkan oleh Brimob dan satu orang lokal ditembak dengan peluru karet.³⁶ Ini adalah subyek dari pengaduan ketiga kepada CAO.³⁷ Pada Oktober 2013, sejumlah masyarakat adat Batin Sembilan yang terkena dampak dari operasi Asiatic Persada meminta Gubernur provinsi Jambi untuk segera mencabut HGU (hak guna usaha) perusahaan tersebut karena kesulitan terus-menerus yang mereka alami dan tidak adanya manfaat sama sekali dari kehadiran perusahaan tersebut. Upaya-upaya mediasi yang difasilitasi oleh CAO telah macet menyusul penjualan Asiatic Persada oleh

Wilmar kepada PT Agro Mandiri Semesta dari Ganda Group, tanpa konsultasi sebelumnya dengan masyarakat yang terkena dampaknya, dan pada saat mediasi sedang berlangsung.³⁸

Jumlah konflik dengan masyarakat dan rutinitas munculnya masalah tersebut menunjukkan adanya masalah sistemik yang terkait pada operasi Wilmar, sebagaimana disoroti dalam sebuah surat kepada Ombudsman Penasihat Ketaatan (CAO) dari IFC pada bulan Maret tahun lalu yang ditandatangani oleh FPP, Sawit Watch dan delapan OMS Indonesia dan internasional lainnya. Surat itu mencatat laporan-laporan dengan masalah serius pada banyak operasi Wilmar – sebagai tambahan terhadap kasus-kasus tertentu yang mulai dikaitkan dengan daftar CAO di bawah ini. Ini mencakup sengketa lahan atau keluhan masyarakat lokal lainnya di seluruh anak perusahaan Wilmar yang tercatat sejak 2007. Surat itu mencatat permohonan sebelumnya, pada 2011, yang mendesak CAO untuk melaksanakan peninjauan kembali yang lebih luas terhadap operasi Wilmar karena berkaitan dengan perolehan lahan dan penyelesaian sengketa, dan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mengadopsi langkah-langkah yang efektif untuk menangani secara sistematis konflik-konflik lahan di wilayah konsesinya sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional, Standar Kinerja IFC dan Prinsip-prinsip dan Kriteria RSPO.

Surat pada 2012 itu juga mencatat bahwa Wilmar diwajibkan menerapkan standar IFC terhadap rantai pasokan keseluruhannya, termasuk para pemasok yang bukan anak perusahaan Wilmar, yang merupakan sumber dari setidaknya 70% dan kemungkinan sebanyak 90% dari minyak sawitnya.³⁹

FPP mencatat bahwa serangkaian pengaduan terhadap Wilmar memicu dilakukannya audit oleh CAO yang mengindikasikan adanya kesalahan terhadap pendanaan Wilmar oleh IFC, yang menegaskan masalah-masalah yang diangkat dalam pengaduan para OMS pada 2007. Audit CAO itu lalu menyebabkan Presiden Bank Dunia menengguhkan seluruh pendanaan Kelompok Bank Dunia terhadap kelapa sawit di seluruh dunia selama hampir dua tahun sementara Bank Dunia melakukan konsultasi dan mengadopsi suatu kerangka strategi investasi di sektor minyak sawit. “Sejak 2011, investasi IFC di perusahaan minyak sawit besar telah nyaris berhenti (meskipun IFC sedang mempertimbangkan tiga permohonan)” lapor FPP pada April tahun ini, “dan upaya-upaya IFC telah difokuskan pada bagaimana menyalurkan dana ke sektor tersebut melalui perantara finansial sambil memastikan penyediaan yang adil bagi plasma.”⁴⁰

“Sementara itu, di lapangan, kebanyakan sengketa antara anak perusahaan Wilmar dan masyarakat tetap tidak terselesaikan dan memang terus bertambah banyak, baik di

Penyingkapan baru Greenpeace ‘Licence to Kill’ (‘Izin untuk Membunuh’) mengaitkan Wilmar dengan hilangnya habitat harimau, perkebunan ilegal

Para pembuat produk-produk konsumsi terkenal seperti biskuit Oreo, produk cukur Gillette dan Clearasil yang memperoleh minyak sawit mereka melalui Wilmar menjadikan para konsumen sebagai kaki tangan yang tak disengaja dalam perusakan hutan Indonesia, dan mendorong spesies yang amat sangat langka seperti harimau Sumatera ke jurang kepunahan, menurut Greenpeace. Laporan organisasi tersebut, Izin untuk Membunuh, yang dipublikasikan di bulan Oktober, melaporkan hasil-hasil investigasi pada perkebunan-perkebunan yang terkait dengan Wilmar di Sumatera, yang menemukan perusahaan tersebut terkait dengan kebakaran lahan gambut di konsesi-konsesi kelapa sawit; perusakan hutan hujan secara besar-besaran dan pembuatan kebun-kebun kelapa sawit ilegal di dalam wilayah Taman Nasional Tesso Nilo; dan pembabatan secara luas habitat harimau maupun orangutan. Greenpeace menyatakan Wilmar yang diketahui memiliki, mempunyai porsi yang signifikan, atau berdagang dengan sebagian besar produsen yang telah didokumentasikannya terlibat dalam kegiatan-kegiatan tak bertanggung jawab atau ilegal. Laporan itu dapat diperoleh dari Greenpeace di: http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/LicenceToKill_ENG_LOWRES.pdf

*Indonesia dan sekarang di Nigeria.*⁴¹

Kasus-kasus pengaduan lainnya terhadap Wilmar yang dibawa di Indonesia serta di Nigeria dan Uganda dicatat oleh Friends of the Earth.⁴²

Laporan-laporan konflik yang terkait dengan Wilmar terus mencapai media, yang paling akhir di **Kalimantan Tengah**. Di sini, empat penduduk desa terluka oleh para satpam di perkebunan **PT Bumi Sawit Kencana** milik Wilmar di kabupaten Kotawaringin Timur pada Juli 2013. Satpam-satpam tersebut diduga memukul beberapa penduduk desa Pantap dan merusak motor mereka. Para penduduk desa telah memprotes penggalan parit oleh perusahaan di lahan yang diklaim oleh para penduduk desa tersebut. Mongabay Indonesia melaporkan bahwa setelah insiden ini para pemrotes menyelamatkan diri ke desa mereka, mengadu ke para penduduk dan kemudian kembali ke lokasi tersebut, di mana mereka menemukan para satpam yang mempersenjatai diri mereka dengan senapan rakitan. Para penduduk membakar dua pos keamanan perusahaan dan

merusak dua truk dan satu mobil milik perusahaan. Empat orang terluka dalam bentrokan ini dan sebuah motor milik seorang penduduk desa hancur. Laporan itu menyatakan bahwa kedua pihak sejak itu telah menyetujui perjanjian damai, tapi masih ada rasa takut bahwa konflik itu akan terus berlanjut jika akar masalah yang telah lama ada itu tidak diselesaikan. Menurut WALHI Kalimantan Tengah, konflik itu hanyalah satu dari banyaknya kasus di wilayah itu yang terkait dengan lahan masyarakat yang diambil alih untuk konsesi, di mana tak satu pun kasus itu yang telah terselesaikan.⁴³

Mongabay Indonesia telah mencatat daftar nama delapan belas anak perusahaan Wilmar di provinsi Kalimantan Tengah, yang mencakup total wilayah 276.920 hektare, termasuk daerah yang ditanami serta daerah simpanan lahan yang belum ditanami.⁴⁴

Proses perolehan lahan yang diikuti oleh anak perusahaan Wilmar lainnya, **PT Mustika Sembuluh**, telah diinvestigasi secara detail oleh sebuah konsorsium OMS. Konsesi ini di Kalimantan Tengah adalah salah satu yang pertama menerima sertifikasi RSPO setelah sebuah penilaian oleh PT TUV Rheinland pada 2009. Kajian pada 2012 oleh OMS tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan dalam konsesi PT Mustika Sembuluh, berupaya menentukan apakah beberapa dari masalah-masalah yang diangkat dalam penilaian tersebut telah ditangani oleh perusahaan tersebut. Ini termasuk sengketa lahan yang sedang berlangsung terhadap pemakaman yang hancur, kurangnya identifikasi dan perjanjian yang terdokumentasi antara perusahaan dan masyarakat lokal menyangkut hak-hak tradisional mereka dan penggunaan lahan tersebut, kurangnya pemantauan dan pengawasan wilayah yang bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value, HCV), dan kurangnya pemantauan berkala dan manajemen dampak-dampak sosial; yang semuanya diwajibkan berdasarkan kriteria sertifikasi RSPO. Kajian itu menemukan bahwa banyak dari masalah yang dihadapi masyarakat berlangsung lebih dari dua tahun setelah perkebunan itu disertifikasi sebagai berkelanjutan dan tanpa terpengaruh oleh penutupan PT TUV terhadap masalah-masalah ketidaktaatan utama setelah diverifikasi pada Desember 2009. Ini berkaitan dengan lahan kantong, polusi dari sungai-sungai lokal, nilai konservasi tinggi dan penyelesaian konflik dan mediasi. Ada pula masalah-masalah dengan masyarakat yang dijanjikan lahan kebun ‘plasma’ dan tidak menerima apapun seperti pembagian lahan minimum yang diwajibkan secara hukum, ditambah penanaman sawit secara ilegal di dekat sungai, danau dan anak sungai, yang menghambat akses masyarakat ke sumber daya ini.⁴⁵

Di **Papua**: Wilmar juga terlibat dalam proyek MIFEE yang banyak dikritik di Papua.⁴⁶ Walau tidak di sektor kelapa sawit,⁴⁷ investasi ini telah mengangkat keprihatinan

yang sama tentang proses perolehan lahan dan potensi dampaknya pada masyarakat. Anak perusahaan Wilmar **PT Anugrah Rejeki Nusantara (ARN)** berupaya memperoleh lahan untuk perkebunan tebu di desa Baad, Merauke. Di sini masyarakat lokal menghadapi tekanan untuk menyerahkan tanah adat mereka dengan ganti rugi minimal dan prospek yang sangat buruk untuk memperoleh keuntungan. Setelah melihat dampak yang merusak dari MIFEE di desa tetangga, Zanegi, di mana kelaparan dan kemiskinan terjadi akibat perolehan lahan oleh Medco Group untuk perkebunan kayu industri, para penduduk desa di Baad sedang berpikir dua kali untuk melepaskan tanah mereka. Hal ini didokumentasikan oleh staf ornop FPP dan Pusaka yang mengunjungi wilayah ini awal tahun ini.⁴⁸

Tanggung gugat gabungan

Sebagaimana diperlihatkan dalam konflik terakhir di Kalimantan Tengah, sistem pengaman yang ada untuk mencegah perlakuan buruk korporasi terhadap masyarakat di Indonesia tidak berjalan. Uni Eropa juga tidak dapat meyakinkan warga negaranya bahwa biodiesel yang menjadi bahan bakar transportasi, atau menghasilkan panas dan listrik di negara mereka betul-betul dihasilkan dengan cara yang berkelanjutan secara lingkungan hidup dan sosial. Perusahaan seperti Wilmar mengambil laba dari kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi emisi karbon Eropa dengan mengorbankan masyarakat dan iklim. Ilmu pengetahuan telah menginformasikan kita bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyerukan UE untuk menolak biodiesel dari minyak sawit. Semakin tinggi batas atas terhadap penggunaan minyak sawit, semakin besar masalah di lapangan di Indonesia, kata mereka.⁴⁹ UE perlu mengambil tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, dan memotong minyak sawit, bersama dengan seluruh bahan baku bahan bakar hayati berbasis lahan yang merusak lainnya dari bahan bakar transportasi dan campuran energi.

Catatan

1. Rujukan buletin pertama DTE terhadap Wilmar adalah pada tahun 2005 ketika Wilmar disebut-sebut di antara perusahaan yang konsesinya telah diidentifikasi sebagai tuan rumah 'titik panas', atau kebakaran hutan. Lihat <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/forest-fires-Sumatera>. DTE juga telah mempublikasikan informasi tentang Wilmar dan anak perusahaannya, mulai dari pengalaman seorang perempuan sebagai pekerja kebun yang terkait dengan penyemprotan zat kimia (lihat DTE 78, Agustus 2008 <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/working-oil-palm-plantation-snapshot-one-womans-life>) hingga kemunculan Wilmar dalam penelitian dana pensiun oleh Grain, lihat DTE 93-94: <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/international-landgrabbing-picture-update>
2. Perusahaan itu memperdagangkan minyak sawit dari anak-anak perusahaannya sendiri, tetapi lebih dari dua pertiga dari jumlah minyak sawit yang dijualnya, bersumber dari perusahaan lain. Lihat 'Addressing systemic problems with Wilmar International', surat yang ditandatangani oleh FPP, Sawit Watch dan 8 OMS lainnya, dialamatkan kepada Meg Taylor, CAO/IFC, Washington DC, AS, 7 Maret 2012
3. Hurowitz, Glenn, 2012, Reducing Deforestation and Peatland Conversion from Palm Oil Expansion, cited in Conflict or Consent? Oil palm expansion and community rights, Marcus Colchester, Norman Jiwan dan Sophie Chao, Forest Peoples Programme, Konferensi Tahunan Bank Dunia tentang Tanah dan Kemiskinan 2013, http://www.confcool.com/landandpoverty2013/index.php?page=browseSessions&form_session=36&presentations=show
4. Angka-angka tersebut dikutip dari laman Wilmar pada bulan Desember 2012 <http://www.wilmar-international.com/our-business/plantations-palm-oil-mills/>. Skema plasma juga dikenal sebagai skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sudah ada sejak tahun 1980an, yang menjadi bagian dari program transmigrasi. Skema tersebut melibatkan petani kecil – termasuk pemilik tanah yang menyerahkan tanah untuk skema tersebut – yang digusur dari tanah mereka yang kemudian dijadikan kebun (dalam hal ini kelapa sawit) yang hasilnya kemudian dijual ke perusahaan. Skema yang dipromosikan sebagai kemitraan tersebut kerap kali berarti pengadaan buruh murah bagi perusahaan, sedangkan bagi petani kecil situasi terburuk yang mungkin adalah mereka menjadi budak karena hutang. Lihat, misalnya, 'Hantu di Tanah Kami Sendiri', oleh FPP dan Sawit Watch, 2006.
5. Wilmar International, <http://www.forestpeoples.org/tags/wilmar-international> [tanpa tanggal] diakses pada 9 Okt 2013
6. Wilmar International Limited, Investing for the future, Laporan Tahunan, 2012
7. Wilmar International Limited, Investing for the future, 2012
8. Wilmar International Limited, Investing for the future, 2012
9. Ini tampak jelas dari fakta bahwa total produksi biodiesel Indonesia untuk 2012 adalah hanya 1,9 juta ton (2,21 juta kl), menurut data pemerintah Indonesia. Lihat Development of Bioenergy Utilization in Indonesia, presentasi Powerpoint oleh Dadan Kusdiana, Direktorat Bioenergi, 27 Maret 2013.
10. Perusahaan lainnya adalah: PT Ciliandra Perkasa, PT Musim Mas Medan dan PT Pelita Agung Agrindustri. Lihat tabel.
11. Sampai Agustus, ekspor biofuel 492.000 KL. Kontan, 20 September 2013.
12. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dikutip oleh kelompok media Tempo mengatakan bahwa Eropa adalah target ekspor terbesar Indonesia karena negara-negara UE telah mewajibkan para warga negaranya untuk menggunakan biodiesel untuk kendaraan mereka. ('EU to drop charges against RI Biofuel Subsidy', 16 Agustus 2013). PT Ciliandra, satu dari empat pengeksport utama biodiesel ke UE, misalnya, menyatakan dalam laporan keberlanjutan 2011 bahwa RED memberikan kesempatan untuk memproduksi biodiesel yang bersertifikasi.
13. International Biodiesel Markets: Developments in production and trade. Patrick Lamers, UFP/Ecofys, 2011.
14. Angka yang lebih tinggi yakni 1,09 juta ton untuk jumlah impor ke Eropa disebutkan dalam The Jakarta Post, dengan mengutip data Eurostat: lihat Jakarta Post 'Anti-dumping tariffs severely hurts exports', 1 Juni 2013.
15. Development of Bioenergy Utilization in Indonesia, presentasi Powerpoint oleh Dadan Kusdiana, Direktorat Bioenergi, 27 Maret 2013, dengan mengutip data KESDM. Konversi dari kl ke ton dihitung oleh DTE dengan dasar 1 kl = 0,88 ton.
16. Jambiexpres 'RI Bebas Tuduhan Dumping Biofuel' 19/Aug/2013, menyatakan keempat perusahaan itu memasok 90% ekspor biodiesel Indonesia, sementara The Jakarta Post

Addressing the impacts of the EU's agrofuels policies on Indonesia



- 1/Jun/2013 menulis angka itu sebesar 95%
17. *Mapping and Understanding the UK palm oil supply chain*, Proforest, DEFRA, April 2011.
 18. *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest?* Ivetta Gerasimchuk & Peng Yam Koh, September 2013. Laporan Penelitian GSI/IISD untuk FoE Europe (2012/2013, dua sumber berbeda yang dikutip). Di sini, 'minyak sawit' berarti minyak sawit mentah (CPO) dan tidak mencakup minyak inti sawit (PKO).
 19. *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest?* Ivetta Gerasimchuk & Peng Yam Koh, September 2013. Laporan Penelitian GSI/IISD untuk FoE Europe
 20. *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest?* September 2013.
 21. Berdasarkan skenario bisnis-seperti-biasa, IISD menunjukkan impor minyak sawit untuk membuat biodiesel naik menjadi 2,3-2,9 juta ton pada 2020. *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest?* September 2013.
 22. *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest?* September 2013.
 23. Penyuling dioperasikan oleh Cargill, IOI Loders Crocklaan, MaasRefinery, Sime Darby Unimills dan Wilmar, sebagaimana tercatat dalam *Mapping and Understanding the UK palm oil supply chain*, Proforest, DEFRA, April 2011. Sebuah penyulingan lebih lanjut telah dibangun oleh Neste Oil yang berbasis di Finlandia. Lihat *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest?* September 2013.
 24. Lihat *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest?* September 2013.
 25. '25 Orang Terkaya di Indonesia versi Forbes', *Bisnis Indonesia* <http://www.bisnis.com/25-orang-terkaya-indonesia-versi-forbes> 10 Juli 2013
 26. <http://www.wilmar-international.com>, diakses pada 11 Oktober 2013
 27. Lihat Friends of the Earth, Landgrabs, forests & finance Issue Brief #4, *Wilmar International and its Financiers, Commitments and Contradictions*, http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/47/8/3077/Issue_Brief_4_Wilmar_International_and_its_financiers_-_commitments_and_contradictions.pdf
 28. Lihat Friends of the Earth, Landgrabs, forests & finance Issue Brief #4, *Wilmar International and its Financiers, Commitments and Contradictions*
 29. http://www.rspo.org/en/current_list_of_supply_chain_certification, diperiksa pada 11/Okt/2013.
 30. Lihat www.forestpeoples.org
 31. Lihat Procedural irregularities and standards violations in IFC support for Wilmar Trading, surat ornonp untuk CAO/IFC, bertanggal 18 Juli 2007, <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/ifcwilmarfppletjul07eng.pdf>
 32. Masyarakat mendesak Wilmar mengatasi praktik kotor, DTE 76-77, Mei 2008, <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/masyarakat-mendesak-wilmar-untuk-menghapus-praktik-kotor>
 33. Addressing systemic problems with Wilmar International, surat yang ditandatangani oleh FPP, Sawit Watch dan 8 OMS lainnya, dialamatkan kepada Meg Taylor, CAO/IFC, Washington DC, AS, 7 Maret 2012
 34. Perusahaan itu dijual ke Cargill pada 2005, Lihat <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/brief-dte-67-november-2005> yang kemudian menjualnya ke Wilmar.
 35. *Indonesia: the Governor of Jambi Province must take action to tackle unscrupulous conduct of palm oil plantation* PT Asiatic Persada, 7 Oktober 2013. Siaran Pers oleh Setara Jambi, Sawit Watch, FPP, Perkumpulan Hijau, CAPP.
 36. *Indonesia: the Governor of Jambi Province must take action to tackle unscrupulous conduct of palm oil plantation* PT Asiatic Persada, 7 Oktober 2013. Siaran Pers oleh Setara Jambi, Sawit Watch, FPP, Perkumpulan Hijau, CAPP.
 37. Addressing systemic problems with Wilmar International, surat yang ditandatangani oleh FPP, Sawit Watch dan 8 OMS lainnya, dialamatkan kepada Meg Taylor, CAO/IFC, Washington DC, AS, 7 Maret 2012
 38. *Indonesia: the Governor of Jambi Province must take action to tackle unscrupulous conduct of palm oil plantation* PT Asiatic Persada, 7 Oktober 2013. Siaran Pers oleh Setara Jambi, Sawit Watch, FPP, Perkumpulan Hijau, CAPP.
 39. Addressing systemic problems with Wilmar International, surat yang ditandatangani oleh FPP, Sawit Watch dan 8 OMS lainnya,

- dialamatkan kepada Meg Taylor, CAO/IFC, Washington DC, AS, 7 Maret 2012
40. *The World Bank's Palm Oil Policy*, FPP 29 April 2013, <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2013/04/world-bank-s-palm-oil-policy>
 41. *The World Bank's Palm Oil Policy*, FPP 29 April 2013, <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2013/04/world-bank-s-palm-oil-policy>
 42. Lihat Friends of the Earth, Landgrabs, forests & finance Issue Brief #4, *Wilmar International and its Financiers, Commitments and Contradictions*, http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/47/8/3077/Issue_Brief_4_-_Wilmar_International_and_its_financiers_-_commitments_and_contradictions.pdf
 43. 'Palm oil company guards injure four villagers in Indonesian Borneo clash', Diane Parker, *Mongabay Indonesia* 29 Juli 2013
 44. 'Bentrok Warga Pantap vs Satpam Wilmar Buntut Konflik Lahar Berlarut', Sapariah Satri, *Mongabay Indonesia*, 28 Juli 2013.
 45. Untuk detailnya, lihat *Conflict of Consent? The Palm Oil Sector at the Crossroads, A study on the right to Free, Prior and Informed Consent in PT Mustika Sembulu, Central Kalimantan*, oleh Sophie Chao, Agustinus Karlo Lumban Raja, Fandy Achmad Chalifah dan Ratri Kusumohartono, FPP, WALHI, Sawit Watch, November 2012.
 46. Lihat <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/campaign/mifee>
 47. Sebelumnya di tahun ini perusahaan tersebut mengumumkan sebuah usaha patungan untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Papua dengan Noble Group, tetapi rencana itu dibatalkan beberapa bulan setelah pengumuman itu karena tidak mendapat persetujuan. 'Wilmar says plan stalled as not approved by authorities', *Reuters* 23 Juli 2013.
 48. Lihat *Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil meminta penangguhan proyek MIFEE di Papua menunggu ganti rugi bagi masyarakat lokal*, Siaran Pers oleh FPP, Pusaka dan DTE, 2 September 2013, <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kelaparan-dan-kemiskinan-di-indonesia-organisasi-masyarakat-sipil-menyerukan-penghentian-proye>. Ketika Pusaka dan FPP berupaya mengatur suatu pertemuan dengan PT ARN pada April 2013, untuk mengetahui lebih jauh tentang konsultasi dengan masyarakat yang sedang berlangsung di konsesi Papua tersebut, manajer cabang perusahaan itu menolak berkomunikasi yang layak dengan kelompok ornonp tersebut, suatu perilaku yang bertentangan dengan komitmen dan nilai-nilai inti Wilmar. Ini disoroti dalam sebuah pengaduan oleh kelompok ornonp tersebut yang disampaikan ke kepala tanggung jawab sosial perusahaan Wilmar. Lihat surat FPP, Pusaka, Sawit Watch letter, bertanggal 19 April 2013, <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/international-and-indonesian-civil-society-organisations-compl>
 49. Lihat 'An agrofuels message to Europe's MEPs from WALHI and Sawit Watch' ('Sebuah pesan bahan bakar nabati untuk MEP Eropa dari WALHI dan Sawit Watch'). DTE video, 11 September 2013, <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/agrofuels-message-europes-meps-walhi-and-sawit-watch> ♦



Mengumpulkan buah kelapa sawit, Riau (Foto: DTE)

Perkebunan, stasiun pengisian bahan bakar dan pembangkit listrik

Bagaimana kelapa sawit yang diproduksi di Indonesia mencapai sistem transportasi dan listrik Eropa

Informasi berikut ini umumnya diambil dari *Mapping and understanding the UK palm oil supply chain (Memetakan dan memahami rantai pasokan minyak sawit Inggris)*, laporan Proforest, bulan April 2011 untuk pemerintah Inggris.

Dari perkebunan ke kilang

Minyak sawit berasal dari buah pohon kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) yang tumbuh di perkebunan di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Buah tersebut, yang disebut Tandan Buah Segar (TBS) dalam industri tersebut, dipanen sepanjang tahun dan dihancurkan di kilang, biasanya terletak di dalam atau dekat perkebunan, untuk mengekstrak minyak mentah (CPO) dari bagian daging buah tersebut. Inti sawit juga dipisahkan dari buahnya, diekstraksi dari biji sawit (palm nuts) dan dihancurkan untuk mengekstrak minyak inti sawit (palm kernel oil – PKO). Selain itu, bungkil inti sawit (palm kernel expeller or meal, PKE or PKM) juga diproduksi dari proses penghancuran inti. Residu lainnya (cangkang sawit, serabut sawit dan tandan buah kosong (TBK)), juga dimanfaatkan, yang

beberapa di antaranya dapat digunakan untuk membangkitkan listrik di kilang tersebut. Serabut dan tandan buah kosong tidak dijual di pasar komoditas.

Dari kilang ke stasiun pengisian bahan bakar: biodiesel untuk bahan bakar transportasi

Produk-produk utama yang dapat dipasarkan dari kilang adalah: minyak – minyak sawit mentah (Crude palm oil, CPO) dan minyak inti sawit (palm kernel oil, PKO) dan bungkil inti sawit (palm kernel meal (PKE/PKM)). Semua ini menjadi bahan mentah bagi berbagai jenis produk di sektor pangan, kosmetika, pembersih, pakan hewan dan industri serta menjadi bahan baku untuk bahan bakar pembangkit listrik dan transportasi di Eropa.

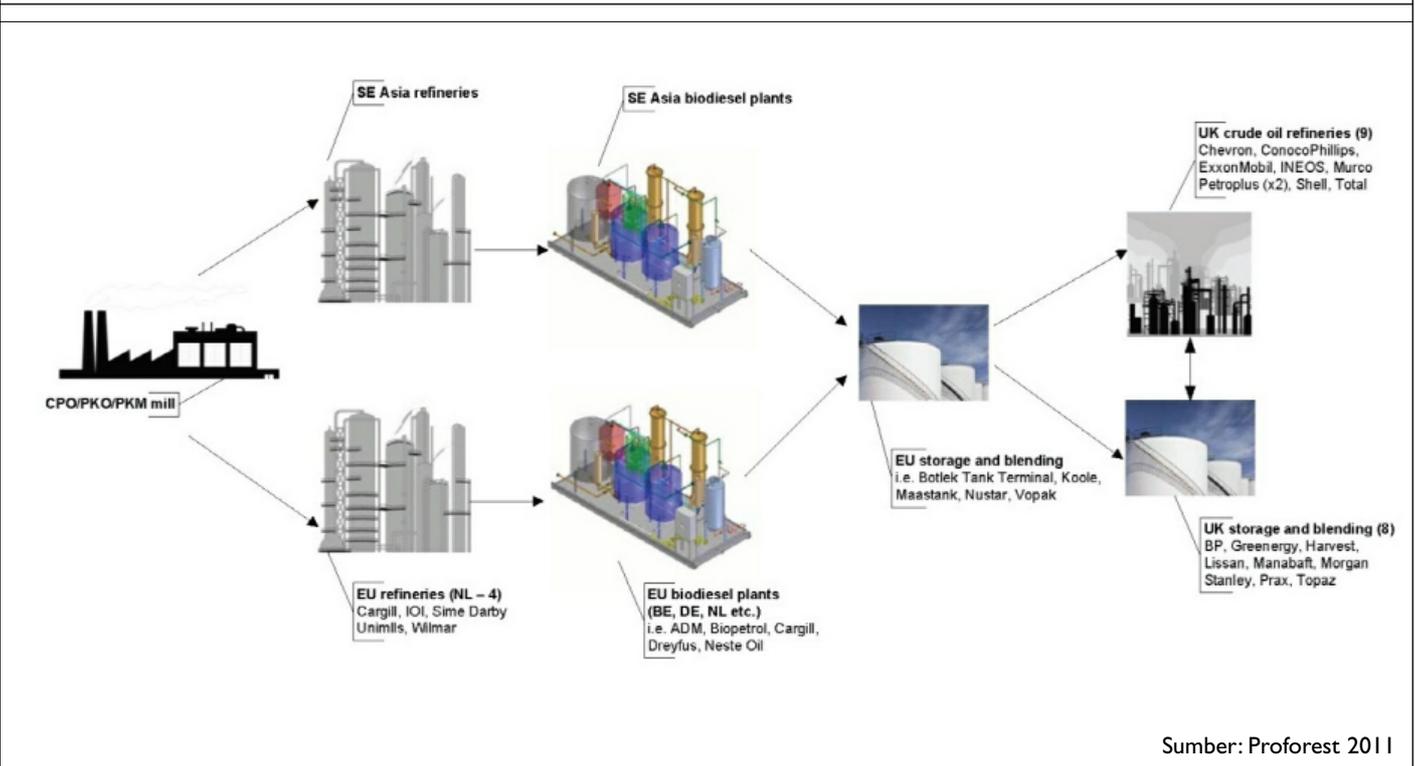
Proses utama dalam pemrosesan produk-produk di kilang yang digunakan dalam transportasi di Eropa adalah sebagai di gambar.

Untuk menjadikan biodiesel layak untuk pasar Uni Eropa, minyak sawit (CPO dan PKO) diangkut ke suatu penyulingan di mana minyak sawit itu akan diproses (melalui sebuah proses yang disebut transesterifikasi) menjadi metil ester minyak sawit (Palm Methyl Ester, PME). Ini terjadi baik di Eropa, dengan menggunakan minyak sawit impor, ataupun di Asia Tenggara. PME itu kemudian dicampur dengan produk-produk serupa yang terbuat dari minyak lainnya (misalnya biji rapa dan kedelai). Di titik ini, produk campuran tersebut dinamakan FAME (Fatty Acid Methyl Ester, metil ester asam lemak). FAME dicampur dengan solar berbahan bakar fosil di suatu penyulingan minyak untuk membuat produk akhir. Di Inggris, FAME mencapai hingga 7% dari bahan bakar akhir (sebagaimana dilaporkan pada 2011).

PME dibuat baik di Indonesia maupun di Eropa, sedangkan FAME dan produk akhirnya (biodiesel dan campuran solar dari fosil) kebanyakan dicampur di Eropa.

Di Inggris campuran biodiesel tersebut didistribusikan melalui pipa-pipa (bersambung ke hal 21)

CPO & PKO → penyulingan (proses transesterifikasi) → PME (biodiesel minyak sawit) → FAME (biodiesel campuran) → Produk akhir (campuran biodiesel, dicampur dengan solar dari fosil)



Sumber: Proforest 2011

(bersambung dari hal 20)

bawah tanah dari penyulingan di pesisir ke terminal-terminal di daerah Midlands (Inggris tengah). Ada juga jaringan terminal pesisir yang terpisah yang mendistribusikan bahan bakar. Campuran biodiesel itu kemudian diangkut dari berbagai terminal atau depo ini ke stasiun pengisian bahan bakar dan para konsumen sektor swasta dan publik.

Dari kilang ke stasiun pembangkit listrik: produk minyak sawit untuk membangkitkan listrik

Minyak sawit (CPO dan PKO) serta bungkil inti sawit (PKM) dapat digunakan sebagai bahan baku untuk stasiun pembangkit listrik secara langsung, yakni dengan dikapalkan secara langsung ke Eropa dan diangkut ke stasiun pembangkit listrik yang membutuhkannya. Minyak sawit diistilahkan sebagai cairan hayati, sedangkan PKM dinamakan biomassa padat.

Minyak sawit juga diproses menjadi produk-produk lain, termasuk Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), stearin dan olein di penyulingan-penyulingan di Eropa sebelum didistribusikan untuk dipakai di stasiun pembangkit listrik. ♦

Semua publikasi DTE dalam Bahasa Indonesia dapat diakses di www.downtoearth-indonesia.org/id/

Publikasi dalam Bahasa Inggris tersedia di www.downtoearth-indonesia.org

Tautan berguna untuk informasi bahan bakar nabati, prekebuman, tanah dan hak:

- www.forestpeoples.org
- www.foeeurope.org
- www.sawitwatch.or.id
- www.walhi.or.id
- www.aman.or.id
- www.biofuelwatch.org
- <http://www.rightsandresources.org/>
- www.landcoalition.org/
- <http://www.huma.or.id/>
- <http://www.kpa.or.id/>
- <http://www.actionaid.org.uk/food-not-fuel/the-biofuels-debate>

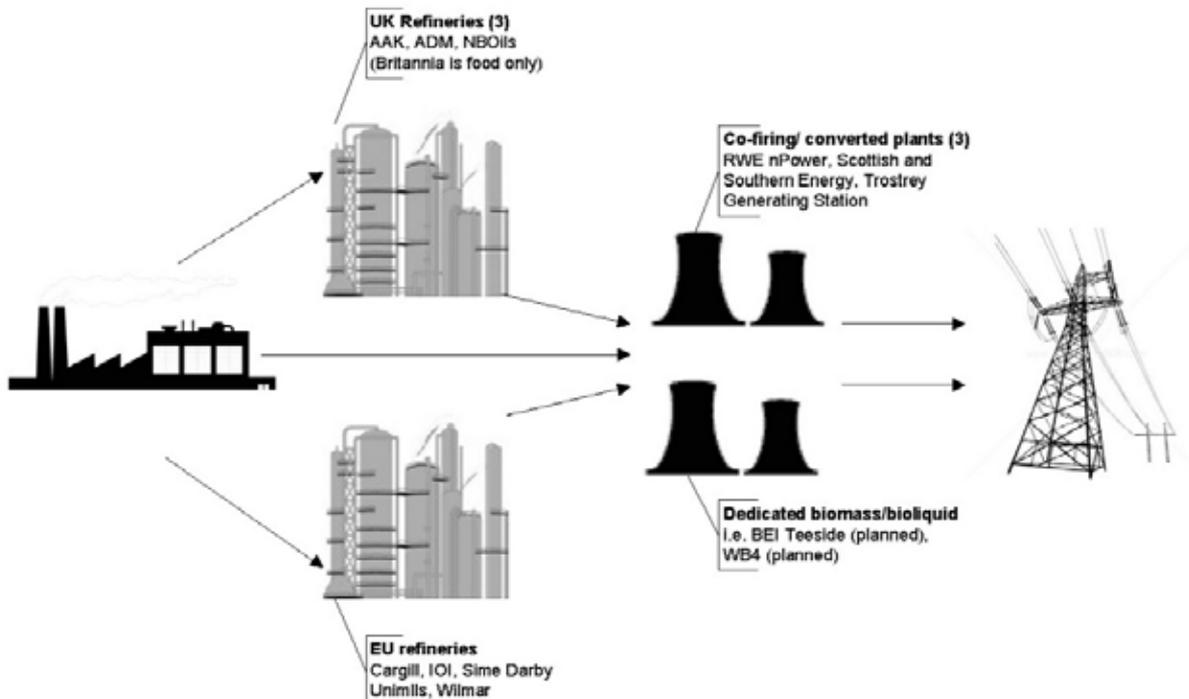


CPO → pembangkitan energi

CPO & PKO → Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) → pembangkitan energi (pembakaran-bersama dengan bahan bakar lainnya) (potensi)

Biodiesel juga dapat digunakan untuk membangkitkan listrik.

NB: Dalam laporan Proforest tahun 2011 disebutkan bahwa proses-proses tersebut dicatat sebagai 'dalam penggunaan' atau 'berpotensi digunakan'.



KEADILAN IKLIM
DAN
PENGHIDUPAN
YANG BERKELANJUTAN
JILID II



Buku DTE (2012). Kompilasi artikel buletin DTE tentang keadilan iklim. Tersedia di situs web www.downtoearth-indonesia.org/id/

Hutan untuk Masa Depan

Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia



Para Editor:
Emilianus OlatKleden
Dir Chadley
Wayun Indrati

Edisi Bahasa Indonesia buku AMAN-DTE book. Tersedia di situs web www.downtoearth-indonesia.org/id/

DTE
Down to Earth

Foto: anak dengan buah sawit, Sumatra. (DTE/Betty Tiominar)

Alamat baru: untuk publikasi DTE alamat mel baru: 5 Tree Terrace, Tree Road, Brampton, Cumbria CA8 1TY, UK